

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN LIAR PARKIR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

GALANG DHARMA JOLIAN

NPM: 1521020123

Jurusan : Siyasah Syar'iyah



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H /2020 M

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN LIAR PARKIR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

GALANG DHARMA JOLIAN

NPM: 1521020123

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H /2020 M**

ABSTRAK

Pungutan liar parkir adalah suatu tindak pidana yang memang harus dibahas secara menyeluruh dan tuntas agar tidak ada perselisihan. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak memahami aturan-aturan dalam penggunaan parkir di tepi jalan, di mana justru pengguna parkir yang menggunakan badan jalan yang membuat kemacetan di jalan. Kondisi ini tentunya yang mengakibatkan kemacetan di jalan-jalan yang digunakan sebagai lahan parkir, maka dibutuhkan peran pemerintah di dalamnya untuk menertibkannya sekaligus menunaikan aturan-aturan yang berlaku tentang parkir liar. Peran pemerintah sebagai pihak yang berwenang haruslah memberikan suatu pelayanan publik, baik fasilitas sarana dan prasarana dalam mengatur arus lalu lintas kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Kota Bandar Lampung. Maka dalam skripsi ini permasalahan yang ingin dikaji adalah: Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung, kemudian Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung. Kemudian skripsi ini bertujuan: untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung dan perspektif Hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di kota Bandar Lampung

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya dan untuk mengetahui hasil lapangan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Adapun penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara komperhensif mengenai suatu yang menjadi pendekatan obyek, gejala atau kelompok tertentu. Dalam pengambilan kesimpulan, metode yang digunakan adalah metode *deduktif*, yaitu suatu pola yang dilakukan untuk mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum, untuk di dapatkan dan di tarik menjadi kesimpulan pengetahuan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dari fokus masalah yang telah dikaji melalui wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah melalui Dishub Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penanggulang pungutan liar parkir menggunakan dua metode yang bersifat Preventif dan Represif yaitu penanggulangan pungutan liar parkir baik sebelum dan sesudah terjadi. Penanggulangan ini dengan melakukan imbauan-imbauan dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak pelayanan publik agar masyarakat dapat mengetahui persoalan-persoalan ini secara tuntas. Dan juga melakukan upaya-upaya pengawasan di setiap lahan parkir untuk mengurangi tindakan-tindakan pungutan liar parkir.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721-703260

PERSETUJUAN

Nama : Galang Dharma Jolian
NPM : 1521020123
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah
**Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung
Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan
Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota
Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah Universitas Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
NIP. 195707051989031001

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.
NIP. 197403072000121002

Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penenanggulangan Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)"** disusun oleh **Galang Dharma Jolian (NPM. 1521020123, Program Studi Hukum Tata Negara/ Siyasaah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munasqasyah Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jum'at, 6 Maret 2020.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. A. Kumedj Ja'far, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Penguji III : Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.H.

Dekan Fakultas Syaria'ah

Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ □ مِّنْكُمْ ۚ ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa : 29)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

PERSEMBAHAN

Sujud syukur Ku persembahkan pada Allah Yang Maha Kuasa, terimakasih atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, berkat rahmat dan detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi saya pada orang-orang tersayang:

1. Kedua orang tua saya ayahanda Joko Prihatin dan ibunda Yuliana tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, mendidik saya sejak dari kecil hingga dewasa seperti ini, terima kasihku persembahkan atas jasa, perjuangan dan pengorbanan dalam hidup ini. serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Dan berkat doa restu keduanyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adikku Naufal Hanif Jolian dan Adik bungsuku Azwar Habib Jolian semoga gelar ini bisa menjadi motivasi untukmu supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
3. Rekan-rekan seangkatan (Siyasah 2015) dan saudara-saudaraku khususnya Siyasah A yang tidak akan saya lupakan, terimakasih untuk kebersamaan selama ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya sehingga bisa menyelesaikan studi ini.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 29 Mei 1997 Dengan nama lengkap Galang Dharma Jolian putra pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Joko Prihatin dan Yuliana, berikut riwayat pendidikan penulis:

1. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 3 Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 28 Bandar Lampung selesai pada tahun 2012.
3. Melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 14 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015.

Dan pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara).

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu al-Qur'an dan Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof, Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah (Hukum Tata Negara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku ketua Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah (Hukum Tata Negara) UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku Pembimbing I yang mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan

dan memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah (Hukum Tata Negara) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
6. Rekan-Rekan Mahasiswa/i Fakultas Syariah khususnya jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 6 Maret
2020

Galang Dharma Jolian
1521020123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
TRANSLATER ARAB-INDONESIA	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Penegasan Judul Global	5
C. Latar Belakang Masalah	6
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Parkir.....	16
1. Parkir Liar	18
2. Kebijakan Parkir.....	21
B. Hukum Islam	22
1. Pengertian Hukum Islam	22
2. Sumber Hukum Islam.....	24
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	39
4. Fungsi Hukum Islam	42
C. Tinjauan Pustaka.....	
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	47
1. Profil dan Sejarah Kota Bandar Lampung	47
2. Pemerintahan.....	51
B. Gambaran Umum Dishub Kota Bandar Lampung.....	51
1. Profil dan Sejarah.....	51
2. Visi dan Misi	53
3. Struktur dan Sumber Daya	54
4. Kebijakan Dishub Kota Bandar Lampung	58

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung.....61
- B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan76
- B. Rekomendasi.....77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Mengenai *Transliterasi* Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/U/Tahun 1987, sebagai berikut:

a. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ذ	<u>Dz</u>	ظ	zh	ن	n
ب	B	ر	R	ع	‘	و	w
ت	T	ز	Z	غ	gh	ه	h
ث	<u>Ts</u>	س	S	ف	f	ء	’
ج	J	ش	Sy	ق	q	ي	y
ح	<u>H</u>	ص	Sh	ك	k		
خ	Kh	ض	Dh	ل	l		
د	D	ط	Th	م	m		

b. Vokal

Vokal Pendek		Contoh	Vokal	Panjang	Contoh	Vokal Rangkap	
ا	A	جدل	ا	A>	سار	اي...	ai
ي	I	سبيل	ي	I>>>>>>>>	قيل	و...	au
و	U	نكر	و	U>	يجور		

c. Ta marbuh

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhaf, Raudhaf, Jannatu Al-Na'im

d. Syaddah atau Kata Sandang

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. seperti kata : nazzala, rabbana. sedangkan kata sandang "al" tetap ditulis "al", baik pada kata yang dimulai dari huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-markaz, al-Syamsu

e. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'an* (dari *al-qur'aan*), *sunnah* dan kata-kata lainnya. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'aan

Al-Sunnah qabl al-tadwiin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas perspektif pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul proposal dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul ini adalah "PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN LIAR PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)". Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), dimana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu "*peranan*".¹

2. Parkir Liar

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara². Dalam hal ini, parkir liar lebih tepatnya diartikan sebagai suatu kondisi dimana sebuah kendaraan diletakkan tidak sesuai dengan tempat yang disediakan.

3. Pungutan Liar

¹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 20.

² Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996

Secara umum, pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta uang atau barang yang dilakukan secara tidak tertata, tidak berizin resmi, dan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

4. Perspektif

Suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena³.

5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, adapun beberapa istilah hukum Islam tersebut antara lain:

a. Hukum

Secara sederhana diartikan sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegaskan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat.

b. Hukum dan *Ahkam*

Kata hukum dalam bahasa Arab artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolak-ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai

³ Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30.

tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut di atas dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu, memang erat sekali, sebab, setiap peraturan, apa pun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya⁴.

c. *Syari'at*

Yang dimaksud dengan *Syari'at* atau ditulis juga *Syari'ah*, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. *Syari'at* memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.⁵

d. *Fiqh*

Fiqh secara bahasa artinya paham atau pengertian. Sedangkan Ilmu *Fiqh* adalah ilmu yang berusaha memahami sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang dalil-dalilnya terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁶ Kemudian diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Menurut Mahmud Syaltut,

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Malang: Penerbit IKIP Malang, 1982)

⁵ Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, 2011), h. 1.

⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Ed. 1, Cet. 3, h. 250.

dalil-dalil ini diambil dari sumber hukum Islam. Sumber syari'at dalam Islam ada tiga sumber pokok, yaitu⁷ :

- 1) Al-Qur'an
- 2) As-Sunnah
- 3) Ar-Ra'yu

Ar-Ra'yu Yaitu suatu pendapat dari metode penelitian dari kandungan al-Qur'an dan Sunnah, serta mempertemukan antara hukum yang tidak terdapat teksnya dengan hukum yang telah ada teks hukumnya, juga termasuk penelitian tentang aplikasi/penerapan kaidah-kaidah kulliyah (global) yang diambil dari Juzziyatil Qur'aniy (bagian-bagian al-Qur'an) terhadap kasus-kasus yang dikemukakan. Sumber hukum⁸ Ar-Ra'yu terdapat beberapa kaidah ushul yang merupakan hasil dari ijtihad para sahabat dan ulama, antara lain: *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Al-Urf*, *Istishab* dan sebagainya. Dilingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum yaitu:

- a) *Syari'at*, yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan sesuatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya yang secara jelas terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.
- b) *Fiqh*, yaitu ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syara bersifat perbuatan (yang difahami) dari dalil-dalil rinci atau hukum-

⁷ Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, 2011), h. 18.

⁸ *Ibid.*

hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dalil-dalilnya yang rinci (terutama ayat-ayat al-Qur‘an dan hadits).

- c) *Siyasah Syar’iyyah*, yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, yaitu melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama. Kemaslahatan itu dicapai melalui aturan yang telah disepakati oleh semua golongan masyarakat yang bersifat mengikat dan apabila melanggarnya dikenakan sanksi atau hukuman. Kewenangan pemerintah itu disebut *al-qawanun* (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari‘at (agama).

B. Penegasan Judul G

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul proposal tersebut adalah:

1. Alasan Objektif

- a. Banyak terjadi fenomena pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung.
- b. Masyarakat seolah membiarkan fenomena pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung.
- c. Tidak ada aturan baku yang mengatur tentang masalah pungutan liar di Kota Bandar Lampung.

2. Alasan Subjektif

- a. Peneliti bisa menyelesaikan penelitian dengan tepat waktu.

- b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian proposal skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, fenomena perparkiran sudah menjadi fenomena yang sering dijumpai di dalam sistem transportasi. Fenomena ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Kegiatan parkir itu sendiri adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara⁹.

Kemudian, kegiatan parkir juga dapat salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah dimana kegiatan parkir akan menghasilkan apa pajak/retribusi yang nantinya akan masuk ke dalam kas pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

⁹ Dirjen Perhubungan Darat, 1996

Salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting adalah pajak parkir, sebagaimana disebutkan di dalam *Pasal 2 ayat (2) UU 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)* bahwa :

Pasal 2

2. *Jenis Pajak kabupaten/Kota terdiri atas:*

- a. Pajak Hotel;*
- b. Pajak Restoran;*
- c. Pajak Hiburan;*
- d. Pajak Reklame;*
- e. Pajak Penerangan Jalan;*
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
- g. Pajak Parkir;*
- h. Pajak Air Tanah;*
- i. Pajak Sarang Burung Walet;*
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*

Di dalam *Pasal 2 ayat (2) UU 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)* sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu pajak kabupaten/Kota adalah pajak parkir (point g).

Berikut adalah data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak tahun 2013-2016 :

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan PAD dari sektor Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung.

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	%
2013	246.651.003.114,-	238.115.511.465,-	89,97
2014	283.050.000.000,-	241.130.668.603,-	85,19
2015	434.850.000.000,-	253.181.191.950,-	58,22
2016	519.869.360.000,-	324.667.322.496,-	62,45

Sumber : Data Dispenda Kota Bandar Lampung 2017 (Jazuli Wijaya)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian tertinggi dari realisasasi penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir di Bandar

Lampung adalah pada tahun 2013, yaitu 89,97%. Sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu 85,19%. Realisasi penerimaan terendah adalah pada tahun 2015 lalu mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 yaitu sebesar 62,45%, dengan demikian retribusi parkir turut memberikan andil dalam penerimaan PAD di Bandar Lampung.

Namun pada kenyataannya terdapat banyak sekali masalah parkir di Bandar Lampung, mulai dari adanya parkir liar serta pungutan liar terhadap parkir tersebut. Para oknum-oknum berparas sangar layaknya preman dan beratribut Dinas Perhubungan (Dishub) yang tidak resmi. Pada kasus serupa, dijelaskan bahwa di Jl. Letjen Suprpto, Tanjung Karang Bandar Lampung¹⁰. Pengguna jasa parkir mengaku resah karena juru parkir tersebut sering memaksa bahkan bertindak kasar sehingga hampir beradu fisik saat meminta pungutan parkir di jalan tersebut.

Lalu, sudah sejauh mana Pemerintah menanggulangi masalah tersebut, apa sajakah bentuk-bentuk penanggulangan pemerintah terhadap masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung ?berawal dari pertanyaan ini, akan dilakukan penelitian lebih lanjut yang tentunya akan dibahas dan dideskripsikan dalam konteks Hukum Islam.

D. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini pada dasarnya berpusat pada Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah

¹⁰ *Harian Lampost*, 6 Oktober 2017

Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan fokus penelitian di atas terdapat maka beberapa sub bagian yang akan kembali menjadi fokus dari penelitian ini yaitu mengenai . Pelaksanaan peran pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pungutan liar parkir. Kemudian fokus penelitian ini bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pungutan liar parkir.

Bagian selanjutnya yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai persoalan-persoalan yang timbul dalam kegiatan pemerintah dalam penanggulangan pungutan liar parkir di kota Bandar Lampung. Persoalan-persoalan yang menjadi fokus selanjutnya ini adalah mengenai adakah keresahan warga masyarakat dalam persoalan penanggulangan parkir yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan juga masalah adakah pemungutan liar parkir yang memang tengah dirasakan masyarakat Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tentang perspektif Hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Untuk mempermudah pengetahuan yang benar dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun data yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

2. Sumber Data

Sumber data adalah di mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber data asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Metode

pengumpulan data yang sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, di antaranya:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap pihak dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).

b. Metode Observasi

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan

diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹¹ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.

b. Sampel

Adapun mengenai skripsi ini menggunakan sampel atau bagian kecil dari populasi, Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *purposive* sampling, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel dan lebih mudah untuk diteliti.¹² sampel yang digunakan dalam skripsi ini di antaranya:

- 1) Masyarakat Kota Bandar Lampung yang terdampak dan mengetahui tentang persoalan pungutan liar parkir pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan mengambil sampel dengan jumlah 7 orang.
- 2) Pegawai Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Oktober 2019 berjumlah 3 orang.

5. Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data dalam skripsi ini sebagai berikut adalah:

a. Editing

Teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, maupun

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2002), h.172.

¹² Sugyano, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 82.

dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.¹³ Setelah data-data yang didapatkan melalui wawancara mendalam pada para narasumber maupun hasil observasi.

b. Interpretasi

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan. Teori-teori relevan didapatkan melalui sumber pustaka, bahan bacaan, maupun bentuk penelitian-penelitian sebelumnya.

6. Metode Analisis Masalah

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif adalah cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2002), h.172.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Parkir

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri di tempat parkir, oleh karena itu ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan bisa di garasi mobil, di halaman, dan di tujuan perjalanan, di pelataran parkir, gedung parkir ataupun di tepi jalan. Karena konsentrasi tujuan perjalanan lebih tinggi daripada tempat asal perjalanan, maka biasanya menjadi permasalahan di tempat tujuan permasalahan. Namun sebelum lebih jauh kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi parkir dan stop/berhenti, parkir adalah Suatu keadaan di mana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu (tidak bersifat sementara) PP No. 43 Tahun 1993.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya diparkir di tempat, di mana di tempat mudah untuk dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Dengan demikian untuk mendesain suatu area parkir di badan jalan ada 2 pilihan yakni pola paralel dan menyudut.

Dalam kaitannya antara hukum dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya di areal parkir baik itu *on street parking* maupun *off street parking*, sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir.

Parkir *on street* sepenuhnya dikelola oleh BP (Badan Pengelola) Parkir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, dengan demikian hubungan hukum yang berlaku antara BP parkir dan konsumen parkir *on*

street didasarkan pada hukum objektif. Para konsumen yang memakai tempat parkir *on street* ini akan membayar biaya parkir yang disebut dengan retribusi parkir. Retribusi adalah pungutan yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat atau daerah sehubungan dengan penggunaan fasilitas negara¹⁴. Dapat dikatakan pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah¹⁵.

Selain parkir *on street* juga dikenal parkir di luar bahu jalan yaitu *off street*. Yang dimaksud dengan di luar bahu jalan antara lain pada kawasan tertentu seperti pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.¹⁶ Parkir *off street* dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum maupun Warga Negara Indonesia dengan mendapatkan izin penyelenggaraan parkir baik murni maupun perpanjangan yang diberikan oleh gubernur (BP Parkir) dengan suatu kerja sama bagi hasil. Pada parkir *off street* terdapat beberapa hubungan selain hubungan hukum antara pengelola parkir dengan BP parkir. Pada umumnya pengelola parkir tidak memiliki areal atau gedung sendiri melainkan menjalin kerja sama dengan pemilik atau pengelola gedung/areal parkir tertentu.

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur

¹⁴ David M. L. Tobing, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2007), h. 1.

¹⁵ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Eresco, 1993), h. 7.

¹⁶ Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas Jalan.

dalam pasal 1694 KUHPerdota. Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian lainnya yang umunya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal pokok dari perjanjian itu.¹⁷

Dalam pasal 1706 KUHPerdota diwajibkan bagi si penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memelihara dengan minat yang seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi pasal 1714 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab pengelola parkir, terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen seperti keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

1. Pungutan Liar Parkir

Parkir liar adalah merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan

¹⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1995), h. 107.

umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah parkir liar harus ditata oleh Pemerintah Daerah (WaliKota/Bupati) setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelola parkir perkantoran.

Pungutan liar parkir menurut Menurut Soedjono (1983), Pungli berasal dari bahasa Cina, “*Li*” artinya keuntungan dan “*Pung*” artinya persembahan. Jadi pungli diucapkan dengan Pungli, artinya adalah mempersembahkan keuntungan. Pengertian pungutan dalam KBBI adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang dan pengertian liar dalam KBBI adalah tidak teratur, tidak tertata.

Secara umum, pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta uang atau barang yang dilakukan secara tidak tertata, tidak berizin resmi, dan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut, hal ini sering disamakan dengan pemerasan.

Jika ingin dikaji lebih dalam lagi, pungutan liar juga mengarah kepada adanya pemberian sesuatu baik uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah organisasi (*organized crimes*) atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu dengan tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya. Maka dapat dikatakan bahwa yang

dinamakan pungutan liar parkir adalah suatu jasa yang diberikan kepada petugas parkir dengan cara yang ilegal atau melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga dapat kita cermati apabila benda atau fasilitas yang sudah ada sebelumnya sudah dalam kuasa oknum tersebut dan pengambilan tanpa sepengetahuan pemberi maka hal tersebut menjurus kepada penggelapan atau korupsi. Pungli bisa terjadi apabila adanya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak. Apabila pemungutan tersebut terkesan dipaksakan oleh satu pihak maka perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan pemerasan.

Kemudian pungutan liar parkir dapat dibedakan menjadi dua, lokasi parkir dan juga kepada petugas parkir. Petugas parkir resmi adalah petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dengan bukti memiliki Surat Keputusan (SK) dalam melakukan parkir.

Kemudian mengenai pungutan liar parkir berdasarkan lokasi parkir apakah menggunakan lokasi parkir yang dibolehkan dan lokasi parkir yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan lokasi parkir yang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir. Ketentuan mengenai parkir tepi jalan adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.

¹⁸ Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota dan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir (1998)

- b. Pada jalan yang sempit yang lebarnya kurang dari 6 meter dan mengizinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan dengan lebar 6-9 meter.
- c. Pada jalan di mana arus lalu lintas dipentingkan maka parkir sebaiknya dilarang.
- d. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter.
- e. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan.
- f. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang.
- g. Di dalam daerah persimpangan dengan jarak sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.

Pengendalian ini untuk membantu apakah petugas parkir dan lokasi parkir memang mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi lokasi parkir yang dikelola oleh petugas parkir ilegal, baik di tempat yang ditunjuk sebagai lokasi parkir ataupun tempat-tempat yang tidak ditunjuk sebagai lokasi parkir. Bila ditemukan petugas parkir yang demikian maka perlu diambil langkah pengendalian. Agar langkah pengendalian ini mempunyai kekuatan hukum maka ketentuan mengenai hal ini harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah mengenai perparkiran.

2. Kebijakan Parkir

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ *Ibid.*

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir,
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, dan
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Keberadaan kebijakan parkir adalah agar pengaturan mengenai dasar hukum yang jelas. Kebijakan parkir dengan adanya otonomi daerah dapat direpresentasikan dalam bentuk peraturan daerah (perda) maupun Peraturan WaliKota (perwali). Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat tetapi harus tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad SAW yaitu al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara" sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an, namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum.²⁰

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.²¹ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.²²

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari'at Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah SAW). Sebagian besar pendapat ulama ilmu fiqh sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist. Di samping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam berdasarkan Ra'yu yaitu : ijma', ijtihad, istishab, istislah, istihsan, maslahat mursalah, qiyas, dan 'urf.²³ Kemudian menurut Abuddin Nata sumber hukum Islam dibagi menjadi tiga, di antaranya:²⁴

²¹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 10

²² Kutbuddin Aibak, *"Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)"*. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, *"Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan"*, dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017, hal. 322

²³ Ali Zainuddin, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Sudarsono, 2005), h. 13.

²⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Ed. 1, Cet. 3, h. 67.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.²⁵ Al-Qur'an memuat pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu:

- 1) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- 2) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- 3) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- 4) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

Isi Kandungan Al-Qur'an

²⁵ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah al-,Arabiyah, 1971), hal. 50

1) Segi Kuantitas

Al Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata.

2) Segi Kualitas

Isi pokok Al-Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian :

- a) Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyyah dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
- b) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.
- c) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela.²⁶

b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 23

perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...”
(Q.S Al Hashr : 7)

Perintah untuk meneladani ini seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara

melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya.

Contoh hadits sebagai penjelas al-Qur'an, tentang mengharamkan bangkai, darah dan daging babi dalam Q.S al-Ma'idah [5]: 3)

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ
فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya: “Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati (lever) dan limpa. (HR Ibnu Majah no. 3314 dan dishahihkan Syeikh Al Albani dalam Silsilah al-Ahadits al-Shohihah no.1118)

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.²⁷

Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama Muadz bin jabal ketika diutus ke negeri Yaman yang tercantum di dalam Hadits Nabi SAW.

عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ جَمَصٍ قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ:

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15

«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Artinya: Dari orang-orang Himsh murid, dari Muadz bahwa Rasulullah saw. mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, “Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?” Muadz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasar kitabullah.” Rasulullah bertanya, “Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?” Muadz berkata, “Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw.” Rasul berkata, “Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?” Muadz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku” Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Muadz sambil berkata, “Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridai Rasulullah” (HR. Abu Dawud No. 3592)²⁸

Hadits ini merupakan suatu kisah mengenai Nabi SAW dan Muadz, bagaimana Nabi SAW berpesan kepada Muadz untuk melakukan ijtihad apabila menemukan suatu persoalan hukum yang memang belum ada dalilnya. Kisah ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah al-Qur'an dan hadits.

d. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.²⁹ Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir

²⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), h. 616.

²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 17.

dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam al-Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

- 1) Dasar (dalil)
- 2) Masalah yang akan diqiyaskan
- 3) Hukum yang terdapat pada dalil
- 4) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

e. Masalah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, masalah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada teks khusus (teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara

langsung dalam al-Qur'an dan Hadits disebut masalah *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah *mulgah* (batal). Sementara itu, masalah *muralah* bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembenarannya secara langsung.³⁰

Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan. Bahkan di zaman Nabi SAW dan beberapa abad lamanya sepeninggal beliau umat Islam tidak mencatat nikahnya. Namun demikian, tidak ada larangan mencatatkannya. Justru dengan mencatatkan nikah itu akan terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar dan masyarakat terhindar dari kemudharatan. Atas dasar kebaikan dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa ijtihad hukum Islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh masalah *mursalah*.

f. Istihsa>n

Secara harfiah, *istihsa>n* berarti memandang baik dalam teori hukum Islam, *istihsa>n* merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau pengecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr, 1986), h. 858.

perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut.

Lazimnya dalam ilmu ushul Fiqh, *istihsa>n* diartikan sebagai “Meninggalkan suatu ketentuan hukum umum yang berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya dalil syara’ untuk melakukan hal demikian”.³¹

Misalnya, aturan umum dalam hukum Islam adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, dalam keadaan khusus di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang, maka wakaf diperbolehkan dijual dengan melanggar aturan umum mengenai larangan menjual wakaf itu.

Jadi, dibolehkan menjual harta wakaf dalam kasus ini didasarkan kepada *istihsa>n*, yaitu tindakan mengambil kebijaksanaan hukum berdasarkan suatu alasan hukum (dalil) yang menghendaki hal itu dilakukan. Pada intinya, *istihsa>n* merupakan suatu upaya mengatasi kelakuan penerapan logis aturan umum, di mana apabila penerapan aturan umum itu dalam kasus tertentu tidak lagi dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi.

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 19.

Artinya: *Dialah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu.* (Q.S. al-Baqarah [2]: 29).

Dari sini, kemudian dirumuskan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

"Pada asanya segala sesuatu itu (di luar ibadah) boleh hukumnya sampai ada dalil yang melarang"

Dalam bidang akad (perjanjian), misalnya dari asas kebolehan umum ini timbullah prinsip kebebasan berkontrak, yaitu bahwa orang pada dasarnya dibolehkan untuk membuat jenis akad (perjanjian) baru apa saja dan mengisikan ke dalamnya klausul apa pun sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar ketentuan yang sudah ada.

Istishab jenis kedua, yaitu kelangsungan kebebasan yang asli, menyatakan bahwa *dzimmah* seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan lain. Misalnya dalam hal utang-piutang seseorang ditagih utang oleh orang lain dan orang lain itu tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan atas adanya utang itu, maka orang yang ditagih dianggap bebas dari kewajiban hutang itu sesuai dengan prinsip kebebasan asli dari beban-beban dan tuntutan-tuntutan yang dimilikinya. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi *al-ashlu*

bara> 'atudz-dzimmah (Asasnya adalah kebebasan *dzimmah* (tanggung jawab hukum)).³³

Istisha>b jenis ketiga, yaitu kelangsungan hukum adalah bahwa status hukum yang sudah ada di asa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lain. Termasuk kategori ini adalah ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada tetap terus berlaku sampai ada ketentuan baru yang menentukan lain. Dari prinsip *Istisha>b* ini secara umum dirumuskan kaidah hukum Islam yang berbunyi *al-ashlu baqa> 'u ma> ka>na ala ma> ka>na* (Asasnya adalah berlangsungnya suatu yang telah ada itu sebagai mana adanya).

h. *Syaddudz-dzari>'ah* (Tindakan Preventif)

Secara harfiah, *Syaddudz-dzari>'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum Islam, *Syaddudz-dzari>'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul Fiqh mendefinisikan *Syaddudz-dzari>'ah* sebagai pencegahan perbuatan-

³³ *Ibid.*, h. 160.

perbuatan yang mengakibatkan kerugian meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung kemaslahatan.³⁴

i. 'Urf (Adat)

Adat atau '*urf*' dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teks syariah atau *Ijma*>'. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan teks atau *Ijma*>'.³⁵

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Adat tersebut tidak bertentangan dengan teks (al-Qur'an dan Hadits) atau *Ijma*>' (konsensus)
- 2) Adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat.

Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum Islam adalah ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam Surat al-A'raf [7]: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal.457

³⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), hal.16

Artinya: *“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*

j. Perkataan Sahabat Nabi SAW

Sahabat nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Perkataan Sahabat Nabi SAW adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah di mana tidak terdapat penegasan dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW ataupun dalam *Ijma*> '.

Apabila Perkataan Sahabat bukan merupakan ijihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Perkataan tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan *Ijma*> ', maka dapat menjadi sumber hukum.³⁶ Akan tetapi, apabila Perkataan Sahabat merupakan hasil ijihad murni, maka Perkataan tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum Islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak.

³⁶ Barzah Latupono, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), h. 50.

Sebagian ulama juga menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah az-Zuhaili adalah bahwa Perkataan murni Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.

k. Hukum Agama Samawi (Langit) Terdahulu

Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS dan Nabi Musa AS. Apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama Islam, maka tidak menjadi sumber hukum Islam.³⁷

Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum Islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam al-Qur'an atau Hadits sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariatan hukum. Mengenai ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum dan tidak.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), h. 416.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu:³⁸ 1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, Ketentuannya telah di atur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya. Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan dan tata cara beribadat. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. seperti, iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
2. Hukum kemasyarakatan, Adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: *Mu'a>malah*, *muna>kaha>t*, dan *'uqu>ba>t*.³⁹

³⁸ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika), h. 6-7.

³⁹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, 2011), h. 3.

- a. *Mu'a>malah* mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).
- b. *muna>kaha>t*, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum perdata.
- c. *'uqu>ba>t* atau *jina>>ya>>t*, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya. Selain bagian-bagian tersebut, ada bagian lain yaitu, mukhsamat, dan *ahka>m al-sultha>niyyah*.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang *Mu'a>malah* ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik.

Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, *muna>kaha>t*, *wira>sah*, *Mu'a>malah* dalam arti khusus,

jina>>ya>>t atau '*uqu>ba>t, ahka>m al-sultha>niyyah* (khila>>fah) dan *mukha>samat*.⁴⁰

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum eks Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diuraikan pada pembagian hukum menurut daya kerjanya, maka susunan hukum *mu'a>malah* dalam arti luas adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Hukum perdata Islam adalah mencakup beberapa bidang;
 - 1) *Muna>kaha>t* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya;
 - 2) *Wira>sah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini biasa juga disebut juga hukum *fara>'id*.
 - 3) *Mu'a>malah* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.
2. Adapun Hukum publik Islam mencakup beberapa bidang di antaranya;
 - 1) *jina>>ya>>t*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudu>d* maupun dalam *jarimah ta'zi>>r*. Yang dimaksud dengan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Mohammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 21.

jarimah adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengertian *hudud* jamak dari had yang artinya batas. Jarimah *ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Sedangkan menurut bahasa arti *ta'zir* adalah ajaran atau pengajaran

- 2) *Al-Ahkam al-sulthaniyyah*, membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya;
- 3) *Mukhamasat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

4. Fungsi Hukum Islam

a. Fungsi ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

b. Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan

penetapan hukum Allah dengan subjek dan objek hukum (perbuatan mukalaf). Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

c. Fungsi *Zawajir*

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. *Qishash*, *Diyat*, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, *hudud* untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, *qadhaf*, *hirabah*, dan *riddah*), dan *ta'zir* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.⁴²

d. Fungsi *Tanzhim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah *Mu'amalah*,

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), h. 418

yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.⁴³

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) diperlukan suatu karya-karya penelitian terdahulu atau suatu bahan pendukung sebagai suatu referensi untuk membantu dalam menghasilkan karya ilmiah (Skripsi). Kemudian yang dijadikan sebagai referensi dalam meneliti sebuah penelitian adalah untuk menambah wawasan penulis dan dapat diterima dan dipertanggungjawabkan keabsahan karya ilmiah ini kepada para pembaca.

Untuk memperkecil dari segi objek penelitian ini penulis akan memaparkan karya-karya ilmiah yang membahas persoalan yang memiliki tema yang sama tentang peran pemerintah dalam penanggulangan pungutan liar parkir yang di antaranya sebagai berikut:

Sebuah jurnal yang membahas tentang tindak pidana pungutan liar parkir karya Zipora dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Yogyakarta” di dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang lebih menerangkan kepada penegakan hukum dan saksi hukum kepada petugas parkir yang melakukan pungutan liar.⁴⁴

Kemudian jurnal karya Syaffa Rahmah dengan judul “Evaluasi Terhadap pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang” jurnal ini menerangkan tentang mengevaluasi pengelolaan

⁴³ *Ibid*, h. 45.

⁴⁴ Zipora “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Yogyakarta” *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (22 Januari 2017)

parkir di kota Semarang dengan mengemukakan peran-peran pihak yang terlibat di dalam pengelolaan parkir.⁴⁵

Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Jalan Pemuda, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung)” Karya skripsi oleh Neysa Nadia Amelinda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Lampung sebuah skripsi yang menjelaskan tentang pendapatan asli daerah (PAD) yang di khususkan di seputaran jalan pemuda kota Bandar Lampung.⁴⁶

Skripsi dengan judul “Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung” sebuah skripsi yang ditulis oleh Rio Lianzah dari Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Lampung dengan maksud untuk menjelaskan tentang efisiensi dalam memanajemen pengelolaan parkir dan juga ingin menjelaskan bagaimana peran dinas perhubungan kota Bandar Lampung dalam menangani persoalan ini.⁴⁷

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Bandar Lampung 2015)” skripsi oleh Rezki Anantama dari

⁴⁵ Syaffa Rahmah “Evaluasi Terhadap pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang” *Jurnal Universitas Diponegoro*, (12 Maret 2016)

⁴⁶ Neysa Nadia Amelinda, “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Jalan Pemuda, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2017)

⁴⁷ Rio Lianzah, “Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2017)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang menjelaskan bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah dari perparkiran dan juga menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah dari perparkiran.⁴⁸

⁴⁸ Rezki Anantama, “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Bandar Lampung 2015)” (Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017)

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Profil dan Sejarah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, Kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105 °28' sampa dengan 105°37' bujur timur. Ibu Kota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak diujung selatan pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km². Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Betung.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

- a. Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian Selatan.
- b. Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara.
- c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk betung bagian Utara.
- d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung.
- e. Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadana Ham, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Tabel 3.1. Jumlah Letak Geografi dan Topografi Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Letak Geografi		Topografi	
		Pantai	Bukan Pantai	Datar	Berbukit
1.	Teluk Betung Barat	3	5	7	1
2.	Teluk Betung Selatan	4	7	7	4
3.	Panjang	5	2	-	7
4.	Tanjung Karang Timur	-	11	10	1
5.	Teluk Betung Utara	-	10	8	2
6.	Tanjung Karang Pusat	-	11	10	1
7.	Tanjung Karang Barat	-	6	2	4
8.	Kemiling	-	7	2	5
9.	Kedaton	-	8	8	-

10.	Rajabasa	-	4	4	-
11.	Tanjung Seneng	-	4	4	-
12.	Sukarame	-	5	5	-
13.	Sukabumi	-	6	5	1
	Jumlah	12	86	72	26

Sumber (BPS Tahun 2018)

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No.14 Tahun 1964, keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi provinsi Lampung dengan ibu Kotanya Tanjung Karang-Teluk Betung diganti namanya menjadi Kota madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan diwilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 84 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan,

Kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Tabel 3.2.
Luas
Wilayah
Tiap
Kecamatan
di Kota
Bandar
Lampung

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Teluk Betung Barat	20,99
2.	Teluk Betung Selatan	10,07
3.	Panjang	21,16
4.	Tanjung Karang Timur	21,11
5.	Teluk Betung Utara	10,38
6.	Tanjung Karang Pusat	6,68
7.	Tanjung Karang Barat	15,14
8.	Kemiling	27,65
9.	Kedaton	10,88
10.	Rajabasa	13,02
11.	Tanjung Seneng	11,63
12.	Sukarame	16,87
13.	Sukabumi	1,64

Sumber : BPS 2018

Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa WaliKota/KDH tingkat II berturut-turut sebagai berikut:

1. Sumarsono Periode 1956-1957
2. H. Zainal Abidin Pagar Alam Periode 1957-1963
3. Alimudin Umar, S.H. Periode 1963-1969
4. Drs. H.M. Thabrani Daud Periode 1976-1981
5. Drs. Fauzi Saleh Periode 1976-1981

6. Drs. H. Zulkarnain Subing Periode 1981-1986
7. Drs. H.A. Nurdin Hidayat Periode 1986-1995
8. Drs. H. Sunarto Periode 1995-2005
9. Edy Sutrisno, S.Pd., M.Pd. Periode 2005-2010
- 10.Drs. H. Herman HN, MM Periode 2010-Sekarang

2. Pemerintahan

Secara administrasi Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan, 98 kelurahan, 248 lingkungan, dan 2.679 RT dengan klasifikasi kelurahan swasembada. Secara Umum Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang berjenis kelamin perempuan cenderung lebih banyak dibanding pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan diperhitungkan dalam pemerintahan Kota Bandar Lampung.

Tabel 3.3. Jumlah Kelurahan, Lingkungan dan RT Kecamatan di Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	RT
1.	Teluk Betung Barat	8	23	163
2.	Teluk Betung Selatan	11	26	313
3.	Panjang	7	18	211
4.	Tanjung Karang Timur	11	25	274
5.	Teluk Betung Barat	10	21	240
6.	Tanjung Karang Pusat	1	26	257
7.	Tanjung Karang Barat	6	5	162
8.	Kemiling	7	20	264
9.	Kedaton	8	23	256
10.	Rajabasa	4	10	101
11.	Tanjung Seneng	4	10	100
12.	Sukarame	5	14	273
13.	Sukabumi	6	17	165
Jumlah		98	248	2.679

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2018)

B. Gambaran Umum Dishub Kota Bandar Lampung

1. Profil dan Sejarah

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) nomor 12 tahun 2000 tentang organisasi Dinas-Dinas Daerah, tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang sebelumnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dinas LLAJ) sekaligus melakukan tugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada WaliKota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut, Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan serta Bidang Perparkiran dan tugas pembantuan. Dilihat dari sejarahnya Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung yang sebelumnya Dinas lalu lintas dan angkutan jalan dipimpin oleh, sebagai berikut:

1. I Nengah Madra, S.H.
2. Darwis Ali, S.H.
3. Drs. Zainal Fanani Idris

4. Drs. Zainal Abidin Hasan
 5. Ruslan HD, S.E.
 6. Ir. Eddy D. Saleh
 7. Drs. Normansyah, M.Si.
 8. Rifa I, S.H.
 9. Kadek Sumarta, S.Sos., M.M.
 10. Ir. Ibrahim, M.M.
 11. Ahmad Husna, S. Stp., M.H.
2. Visi dan Misi
- a. Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu Instansi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan Instansi selanjutnya. Kehidupan Instansi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi Instansi harus dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah :

" TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI YANG HANDAL "

Artinya :

“Sistem transportasi yang handal memiliki arti bahwa pengembangan sistem transportasi di Kota Bandar Lampung mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakat Kota Bandar Lampung karena masyarakat berharap bahwa dengan sistem transportasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dapat mengurangi dan mengurai kemacetan yang timbul akibat tidak seimbangnya jumlah kendaraan dan panjang jalan yang ada”.

b. Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan. Agar tujuan Dinas dapat terlaksana dan berhasil dengan baik untuk tercapainya Visi tersebut telah disusun Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai.

Adapun Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah:

1. Terwujudnya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali.
2. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman.

3. Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

Struktur Organisasi.⁴⁹

3. Struktur dan Sumber Daya

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung dibidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dari tata kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Bandar Lampung.
- b. Peraturan WaliKota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

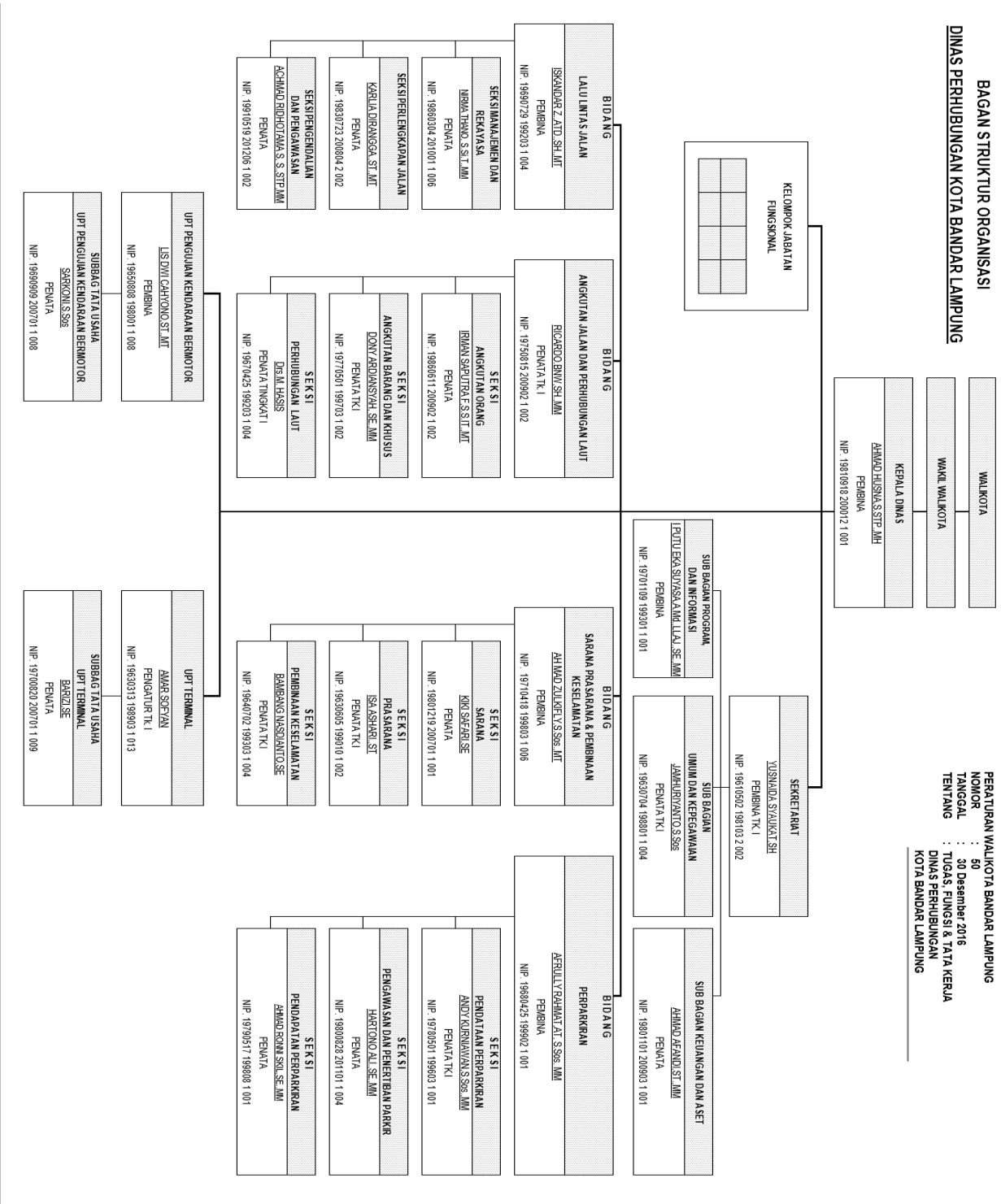
Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana teknis bidang perhubungan berada di bawah tanggung jawab kepada WaliKota Bandar Lampung. Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perhubungan
- b. Sekretaris Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

⁴⁹ http://dishub.bandarlampungKota.go.id/konten-visi_misi.html

3. Sub Bagian Program dan Informasi
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa
 2. Seksi Perlengkapan Jalan
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
- d. Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut, terdiri dari:
1. Seksi Angkutan Orang
 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus
 3. Seksi Perhubungan Laut
- e. Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan, terdiri dari:
1. Seksi Teknis Sarana
 2. Seksi Teknis Prasarana
 3. Seksi Pembinaan Keselamatan
- f. Bidang Perhubungan Laut, Terdiri dari:
1. Seksi Pendapatan Perparkiran
 2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Parkir
 3. Seksi Pendapatan Perparkiran
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung terdiri dari:
1. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal
 2. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung



(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2018)

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan sebanyak 395 yang dibagi menjadi beberapa golongan yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Jumlah Karyawan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

No.	Unsur	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
	GOL IV	6 Pegawai
	GOL III	82 Pegawai
	GOL II	53 Pegawai
	GOL I	53 Pegawai
2.	Pegawai Tenaga Kontrak (PTK)	112 Pegawai
	Jumlah	395 Pegawai

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2018)

4. Kebijakan Dishub Kota Bandar Lampung

Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi Dinas. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Kebijakan Internal

- a. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
- b. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- c. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan Level of Service, kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan.
- d. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas.
- e. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun prasarana terminal yang representatif.
- f. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut.
- g. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan.
 - i. Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.
 - j. Untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Kebijakan Eksternal
- a. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya transportasi.
 - b. Pembinaan terhadap pemilik pengusaha angkutan yang berdomisili di dalam Kota Bandar Lampung.
 - c. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi.
 - d. Pembangunan lanjutan terminal tipe A Rajabasa.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengawasan perusahaan daerah (PD) parkir dalam penertiban parkir liar di sepanjang jalan Kota Bandar Lampung yang dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan didukung oleh beberapa dokumen. Di mana pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam bentuk wawancara dan memperoleh respon pertanyaan yang positif dari para responden. Pengawasan instansi pemerintahan seperti kantor Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Bandar Lampung dalam penertiban parkir liar di sepanjang jalan.

Namun seperti yang kita lihat saat ini, masih ada lahan parkir yang tidak semestinya atau dengan kata lain di paksakan sebagai lahan parkir. Tidak hanya di beberapa lokasi parkir yang tidak resmi, tetapi ada juga di beberapa lokasi parkir resmi. Hal ini disebabkan oleh karena pengunjung yang akan datang, terutama di gedung atau di kantor yang sudah seharusnya memiliki lahan parkir yang luas dan memadai dan juru parkir liar tidak menggunakan atribut dan identitas sebagai juru parkir resmi, dan dapat kita lihat bahwa kerja sama antara Perusahaan Daerah (PD) parkir dengan pihak kepolisian masih kurang maksimal, karena pihak kepolisian seakan masih membiarkan adanya parkir liar yang seharusnya sudah ditangani oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir.

Pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung kurang maksimal dalam menjalankan pengawasannya seperti pengawasan preventif, adalah

pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi. Pengawasan preventif artinya tindakan menjaga atau pemecahan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Perhubungan terhadap situasi dan kondisi di lapangan. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan dapat mencegah atau setidaknya segera dapat mengetahui, memperbaiki atau mengatasi setiap penyimpangan, penyelewengan, pemborosan atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien dan efektif. Salah satu tujuan lahirnya Peraturan WaliKota Bandar Lampung No. 64 Tahun 2011 adalah untuk memperlancar arus kendaraan dan meminimalisir kemacetan sekarang maupun di masa yang akan datang. Adapun bentuk pengawasan Preventif adalah sebagai berikut: (1) sosialisasi, (2) teguran simpatik dan pengawasan represif yaitu patroli. Seperti halnya pengawasan preventif yaitu Sosialisasi adalah penyampaian atau memperkenalkan aturan Perwali tentang larangan parkir, baik dan bentuk ucapan maupun tulisan kepada seluruh masyarakat untuk tegas dalam menegakkan aturan, meskipun demikian masih banyak jukir liar yang tidak sadar atau bahkan tidak mengetahui bahwa lokasi jalan tersebut sudah dilarang. Ini pun perlu di sadari oleh pemerintah bahwa terjadinya pelanggaran itu bisa dikarenakan oleh sosialisasi yang kurang mengenai sasaran. Hal ini dibuktikan oleh wawancara penulis dengan informan yang berada di lapangan, yang dilakukan di seputar tempat parkir Kota Bandar Lampung.

Menurut bapak Ahmad Hasan jukir Indomart Sukabumi, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung terhadap praktik-praktik pungutan liar parkir hanya dilakukan beberapa kali. Akan tetapi Dinas perhubungan tidak konsisten dalam pengawasannya karena mereka melakukan swiping terhadap praktik pungutan parkir liar tidak menentu kadang mengawasi dan kadang tidak hingga berminggu-minggu.⁵⁰

Menurut bapak Andri pegawai Indomart sukabumi, bahwa himbauan atau larangan-larangan terkait persoalan pungutan parkir liar yang dilakukan Dinas perhubungan berupa slogan dan spanduk bahkan tidak ada. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya parkir liar yang dilakukan di Indomart Sukabumi.⁵¹

Menurut bapak Soleh jukir Bank BRI unit Sukarame, bahwa peran Dinas Perhubungan (pemerintah kota Bandar Lampung) dalam melakukan pengawasan pungutan liar parkir yang terjadi di sepanjang jalan P. Bawean belum maksimal, hal ini berdasarkan pengamatannya bahwa banyak terjadi suatu pungutan liar parkir yang dilakukan oleh jukir liar yang bahkan oknum-oknum ini masih di bawah umur.⁵²

Kemudian menurut bapak Nurdin dan bapak Ali warga Kemiling, bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan haruslah dimaksimalkan karena masih banyak warga masyarakat yang merasa resah

⁵⁰ Ahmad Hasan, wawancara dengan penulis, Indomaret S.A. Tirtayasa, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

⁵¹ Andri, wawancara dengan penulis, Indomaret S.A. Tirtayasa, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

⁵² Soleh, wawancara dengan penulis, Bank BRI Unit Sukarame, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

terhadap oknum-oknum jukir yang terkadang mengarah kepada suatu tindakan pemalakan.⁵³

Menurut bapak Galih dan Rudi salah satu juru parkir di Tanjung Karang, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Bandar Lampung haruslah semaksimal mungkin, walaupun tidak di temukan para jukir liar dan pungutan liar, namun kesemrautan kendaraan karena alokasi lahan parkir yang kurang oleh karena itu dibutuhkan suatu tindakan dan fasilitas dalam mengurangi kesemrautan kendaraan yang ada di seputaran jalan di Tanjung Karang.⁵⁴

Dilain pihak, Menanggapi persoalan ini Dishub sebagai pihak wewenang melalui, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung 14 Oktober, Ahmad Husna mengakui telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penertiban terhadap juru parkir liar. Namun, mereka (para juru parkir liar) selalu '*kucing-kucingan*' dengan petugas. "Kami memang selalu memburu dan sering melakukan penertiban, tapi juru parkir liar ini setelah ditertibkan, mereka kembali lagi".⁵⁵

Bahkan Pihak Dinas Perhubungan melalui bidang perparkiran telah melakukan sosialisasi kepada para juru parkir liar dengan cara menyampaikan secara lisan berupa teguran-teguran serta pemasangan spanduk himbauan.⁵⁶

⁵³ Nurdin dan Ali, wawancara dengan penulis, Jalan Pramuka, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

⁵⁴ Galih dan Rudi, wawancara dengan penulis, Tanjung Karang, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

⁵⁵ Ahmad Husna, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 14 Oktober 2019.

⁵⁶ Afrully Rahmat, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 14 Oktober 2019.

Berdasarkan hasil observasi peneliti adanya beberapa spanduk yang berisi tentang Larangan Parkir Liar sangatlah amat kurang karena hanya di tempatkan pada tempat-tempat tertentu. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui oleh Masyarakat pengguna jalan, maka pemerintah harus secara giat melakukan sosialisasi dengan berbagai macam cara salah satunya pemerintah harus kembali melakukan pemasangan stiker di setiap kendaraan agar sosialisasi aturan pemerintah ini bisa tersampaikan kepada khalayak masyarakat umum. Meskipun sebelumnya pemerintah gencar melakukan sosialisasi akan tetapi itu hanya berjalan beberapa bulan dan tidak secara terus.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Hartono Ali bahwa peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan pungutan liar: (1) Regulator, maksudnya bahwa Dinas Perhubungan haruslah tepat dalam membuat suatu kebijakan, (2) Fasilitator, bahwa dalam pengawasannya Dinas Perhubungan haruslah bersinergi dengan masyarakat untuk menampung suatu keluhan-keluhan masyarakat, yang menjadikannya sebagai penyedia sarana dan prasarana khususnya perparkiran dan (3) Evaluator, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas haruslah selalu dievaluasi agar terciptanya suatu pelayanan yang baik bagi masyarakat.⁵⁷

Jika memang demikian seharusnya sampai sekarang himbauan itu tetap ada dipampang di pelataran jalan Kota Bandar Lampung. Sehingga ketika masyarakat pengguna jalan yang memang baru melewati kawasan itu

⁵⁷ Hartono Ali, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 14 Oktober 2019.

dapat mereka ketahui. Jika spanduk itu hanya dipasang dalam beberapa hari saja kemungkinan juga yang membacanya hanya beberapa orang juga.

Pelaksana pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting adalah pengawasan parkir antara lain meliputi patroli oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir, Dinas Perhubungan mengawasi bersama kepolisian setempat melakukan pengawasan represif agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar yang melanggar peraturan pemerintah tentang larangan parkir. Kemudian menyampaikan surat teguran berbentuk sosialisasi untuk menyampaikan surat teguran telah dilakukan oleh pihak.

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Bandar Lampung telah menyampaikan surat teguran serta rambu-rambu larangan parkir di sepanjang jalan Balai Kota Bandar Lampung. Seolah dicuekin oleh para juru parkir liar apalagi para pengendara angkutan Kota (angkot) jenis pete-pete dan mobil pribadi apalagi motor yang tetap parkir, seperti terlihat di depan Kantor Wali Kota Bandar Lampung dan lainnya di sepanjang jalan Kota Bandar Lampung.

Penyampaian surat teguran larangan parkir masih sangat sedikit dan pemerintah dalam hal ini Peraturan Daerah (PD) parkir harus jeli melihat keadaan tempat-tempat titik parkir. Bila perlu ditampilkan juga sanksi yang akan diberikan kepada pengguna jalan apabila melanggar aturan tersebut. Peneliti melihat hanya ada beberapa jukir yang mendapat surat teguran larangan yang telah diberikan oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir.

Sesuai dengan observasi peneliti bahwa penyampaian surat teguran yang di berikan itu masih belum kuat dalam penertiban parkir liar. Teguran simpatik yang di maksud dengan teguran simpatik adalah peneguran yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir kepada parkir liar yang memakai badan jalan sebagai tempat parkir. Tindakan peneguran ini dilakukan agar memberikan perhatian penuh kepada masyarakat tentang pelaksanaan aturan WaliKota No. 64 Tahun 2011 itu, sehingga ada harapan ke depan tidak ada lagi parkir-parkir liar.

Perusahaan Daerah (PD) parkir melakukan peneguran kepada juru parkir liar yang diketahui melanggar atau parkir di bahu jalan. Bentuk teguran simpatik ini masih bersifat menyampaikan serta mengingatkan kepada semua juru parkir liar sehingga di suatu hari nanti ketika masyarakat yang belum mengetahui aturan itu maka di berikan semacam dispensasi hukum berupa nasehat karena berbeda dengan orang yang betul telah mengetahui aturan dengan orang yang memang belum mengetahui aturan.

Beberapa informan yang diwawancarai berbeda, pihak dari Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Bandar Lampung telah melakukan teguran simpatik akan tetapi hanya sebatas pada pengguna jalan yang memarkir di daerah tersebut sehingga dikemudian hari atau sekarang ini masih banyak parkir-parkir liar (Jukir Liar) di sepanjang jalan Balai Kota salah satunya di Kantor WaliKota Bandar Lampung karena mereka belum pernah mendapati sosialisasi tentang aturan Perda tersebut.

Pihak dari Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Bandar Lampung telah melakukan teguran simpatik akan tetapi hanya sebatas pada pengguna jalan yang memarkir di daerah tersebut sehingga dikemudian hari atau sekarang ini masih banyak parkir-parkir liar (Jukir Liar) di sepanjang jalan Balai Kota salah satunya di Kantor WaliKota Bandar Lampung karena mereka belum pernah mendapati sosialisasi tentang aturan tersebut.

Pengawasan represif adalah pengawasan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Bandar Lampung memberikan tindakan untuk menertibkan parkir liar. Patroli harian adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir terhadap pelanggaran yang dilakukan pengendara yang memarkir di jalan Sepanjang Kota. Patroli merupakan cara yang paling umum dilakukan untuk menertibkan parkir liar.

Tanggapan lain mengenai parkir liar adalah mengadakan pengawasan atau patroli rutin untuk menertibkan parkir liar apabila ada laporan yang didapati di lapangan. Masyarakat sangat merespon terhadap patroli harian yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Parkir karena mampu mengurangi kemacetan di jalan ini

Dapat dilihat betul adanya pengawasan yang kurang optimal dari Perusahaan Daerah (PD) Parkir terkait untuk menertibkan parkir liar dengan baik, walaupun terkadang mendapat rintangan dari para parkir liar yang tidak patuh. Selain masalah di atas ada beberapa hambatan dalam pengawasan parkir yang berakibat pada kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung

antara lain yaitu: (1) kurangnya petugas di lapangan, (2) adanya beberapa kantor dan sekolah di jalan Balai Kota, (3) pinggir jalan yang dijadikan tempat parkir darurat/dadakan

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pungutan Parkir Liar secara pengertian berarti mengambil dan menarik tarif parkir secara liar yang berarti tidak resmi, tanpa izin resmi dari yang berwenang. Jadi pungutan liar berarti mengambil sesuatu dengan cara yang tidak resmi atau menarik sesuatu tanpa izin yang berwenang.

Pengertian Pungutan Liar Parkir apabila kita definisikan di dalam perspektif Islam, maka parkir liar di dalam Islam berasal dari bahasa Arab yang biasa disebut sebagai *al-maksu*, yang berarti memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi. *Maksu* (pungutan liar) adalah pajak yang ditagih oleh seseorang secara tidak legal, biasanya dari pedagang-pedagang kecil. Ibnu Mandzur menjelaskan lebih detail yaitu *al-Maksu* adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang dari pasar-pasar pada zaman jahiliyah.⁵⁸ Pungutan liar juga dapat berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pungutan liar didasarkan pada pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah ditentukan. Orang yang melakukan tindakan pungutan liar senantiasa mengabaikan kewajibannya, hal ini karena hanya mementingkan untuk mendapatkan keinginannya, yakni melakukan pungutan.

⁵⁸ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, Jil. VI, (Bayrut: Dar Shadir, 1979), h. 220.

Menurut pandangan hukum Islam pungutan parkir liar merupakan perbuatan dosa, yang perbuatannya melanggar kaidah-kaidah hukum Islam. Walaupun dalam praktiknya pungutan atau tarif parkir liar di katakan lumrah dan bisa diterima oleh masyarakat luas dikarenakan sudah menjadi kebiasaan namun kegiatan tersebut seharusnya dapat ditindak tegas agar tidak banyak masyarakat yang terjerumus dan terus melakukan perbuatan dosa dan haram. Maka dibutuhkan juga peranan pemerintah sebagai penegak hukum. Karena Pemerintah yang memiliki wewenang dan hal ini sekaligus menjalankan perintah Allah SWT yang menganjurkan untuk melakukan Amar ma'ruf Nahi mungkar.

Sebagaimana dalil-dalil Hukum Islam yang mengharamkan Pungutan Liar

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَٰبَاطِلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ ۲۹

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.* (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Dan dalam hadist nabi Muhammad SAW dari sahabat Ruwaifi bin Tsabit RA

إِنَّ صَاحِبَ الْمُكْسِ فِي النَّارِ

Artinya: *“Sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka.”* (H.R. Ahmad dan Thabrani)

Dalam hukum positif suatu kegiatan dikatakan pungli apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta memberatkan berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam yang mengedepankan hukum, karena pungli merupakan perbuatan yang

menyimpang dan jelas merupakan sesuatu yang haram hukumnya. Dikatakan bukan pungli apabila telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah disepakati dan tidak memberatkan pihak mana pun maka kegiatan tersebut halal hukumnya dalam pandangan Islam.

Dalam ushul fiqh terdapat prinsip *al-mashlahah al-mursalah*, yakni kemaslahatan yang disyari'atkan dalam wujud hukum. Dalam rangka menciptakan kemaslahatan yang berdasarkan prinsip, yang mengedepankan suatu baik dan buruk perbuatan dalam pandangan manusia maka pungutan liar yang bisa dikatakan tidak mengedepankan kemaslahatan umum dan menguntungkan suatu individu tertentu maka dalam hal ini pungutan liar parkir tidak dapat dibenarkan. Karena kemaslahatan merupakan hal utama dan pokok di dalam menentukan suatu norma-norma hukum baik negara maupun hukum Islam sendiri.

Dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Sehingga dalam perspektif Hukum Islam yang luas bahwa pemerintah harus ikut serta dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam hal yang berkaitan dengan upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengurangi praktik pungutan parkir liar yang ditinjau dari Pandangan Hukum Islam. Dari sinilah peneliti melihat bahwa dalam mengurangi praktik pungutan parkir liar pemerintah (Dishub) ini memiliki nuansa keagamaan seperti yang terdapat di dalam aspek kesejahteraan atau maslahat (kebaikan) sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial, budaya dan sosial ekonomi. Upaya pemerintah daerah yang mencerminkan suatu nilai-nilai keagamaan dalam upaya mengurangi praktik parkir liar di antaranya:

1. Mengadakan Pembinaan dan Ajakan Untuk Menjadi Juru Parkir Yang Resmi Dan Mendapatkan SPT (Surat Perintah Tugas) dan Mereka Harus Mengikuti Aturan Yang Sesuai Dengan PERDA. Melalui pembinaan ini diharapkan dapat mendorong para petugas parkir liar dapat mendorong dan mampu menghasilkan tim parkir yang terlatih dan juga bisa memberikan pengaruh positif bagi masyarakat pengguna parkir karena mereka akan merasakan kualitas pelayanan dan kenyamanan di saat parkir kepada petugas yang memang resmi.
2. Mengadakan Sosialisasi Tentang Perpajakan Terhadap Masyarakat Agar Mereka Juga Bisa Membedakan Petugas Resmi dan Tidak Resmi. Secara umum sosialisasi dapat diartikan sebagai proses di mana manusia mempelajari peraturan maupun norma-norma yang berlaku pada masyarakat tempat tinggal sehingga nantinya dalam melakukan perannya sebagai anggota masyarakat tersebut.

3. Menindak tegas terhadap petugas Parkir Liar yang melakukan pungutan Parkir Liar di bahu jalan yang dibantu oleh aparat pemerintah lainnya untuk menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku. Secara umum tindakan ini merupakan sebuah sikap terhadap sesuatu hal yang tidak ragu lagi dan penuh pertimbangan (telah dipikirkan dengan matang) dengan resiko yang akan diperoleh. Bertindak tegas memiliki tujuan agar para petugas parkir liar bisa berkurang dan juga pemerintah harus bisa mengupayakan penegakkan hukum yang tegas untuk mengurangi premanisme. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat at-Tahrim [66]: 9:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ ٩

Artinya: *Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. (Q.S. at-Tahrim [66]: 9)*

4. Meningkatkan Mekanisme Perparkiran Oleh Petugas Resmi Untuk Mengurangi Campur Tangan Petugas Parkir Liar. Melalui peningkatan ini pemerintah memberikan pelayanan agar mewujudkan pelayanan jasa yang tertib, teratur, aman dan nyaman, maka diperlukan peningkatan tersebut karena dalam Islam sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur di segala bentuk bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatu tidak diperbolehkan dilakukan secara asal-asalan. Kita semua berharap agar kualitas pelayanan jasa perhubungan berkualitas. Peningkatan kinerja aparatur dalam menertibkan perparkiran sehingga cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa perhubungan dapat tertangani dengan baik.

5. Melakukan pendataan ulang dan pembenahan peningkatan kinerja aparatur yang ada di lapangan dalam penertiban perparkiran agar petugas parkir resmi bekerja sesuai dengan PERDA Tentang Pengelolaan Parkir. Pendataan ulang dan pembenahan dilakukan dengan petugas parkir resmi yang memang bertanggung jawab di lapangan. Seperti dalam salah satu surat an-Nisa [4]: 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ﴾ ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (Q.S. an-Nisa [4]: 58)*

Ayat di atas jelas bahwa memberikan amanat dan hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil. Keadilan disini adalah merupakan asas kepimpinan. Sebagai pemerintah yang memberikan amanat dan tugas kepada koordinator lapangan mereka harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan. Maka dari itu, wajib bagi pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak dapat terpenuhi.

Kelima upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam pandangan Hukum Islam sudah baik dan mengacu pada aturan-aturan al-Qur'an dan Hadist. Selain itu tentu juga harus dipertimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), di mana menghindari keburukan jauh lebih baik daripada mencari dan mengambil kebaikan. Sehubungan dengan itu, mencari yang terbaik daripada yang baik juga harus diutamakan. Dalam kaitan ini bila dengan upaya pemerintah bisa membawa pada kemanfaatan dan kebaikan, pandangan agama adalah positif. Akan tetapi apabila upaya pemerintah untuk mengurangi praktik parkir liar membawa keburukan, maka

pandangan agama negatif terhadap kegiatan tersebut. Dalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan (mafsadat) lebih baik daripada mencuri dan mengambil kebaikan (maslahat). Oleh karena itu pandangan agama akan positif jika upaya yang dilakukan pemerintah dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Agama akan berpandangan menjadi negatif terhadap upaya pemerintah walaupun tujuannya baik tetapi dilakukan dengan cara tidak baik dan jauh dari pandangan syariat, maka hal tersebut ditolak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis dalam skripsi tentang pengawasan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam di seputaran wilayah Kota Bandar Lampung maka penulis menyimpulkan ada beberapa hal, sebagai berikut.

1. Peran pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pungutan liar parkir melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung bahwa melakukan pengawasan preventif dan represif dalam penertiban parkir liar di sepanjang jalan Kota Bandar Lampung itu belum maksimal, ini bisa dilihat dari indikator keluhan-keluhan masyarakat dan kurangnya pengawasan di mana sosialisasi serta teguran simpatik yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan kurang mengenai sasaran dan tidak terus-menerus.
2. Pandangan perspektif Hukum Islam terhadap Peran pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sudah amat memuaskan, bahwa peran pemerintah melalui Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan masalah pungutan liar parkir sudah sesuai dengan unsur-unsur agama Islam. Hal ini terlihat adanya beberapa aspek-aspek agama Islam yang dipakai dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

B. Rekomendasi

1. Kepada aparat penegak hukum, diharapkan mampu untuk lebih tanggap dan dapat memberikan hukuman yang tegas kepada oknum-oknum yang melakukan pungutan liar parkir.
2. Kepada Masyarakat, diharapkan mampu untuk menolak hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimulai dari parkir sembarangan, maupun melakukan kegiatan parkir liar, maupun memberikan uang kepada oknum-oknum yang melakukan pungutan liar parki

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh*, Damaskus: al-Fikr, 1986.
- Brotodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco, 1993.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Penamedia Group, 2010.
- Hasan, Husain Hamid, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Malang: Penerbit IKIP Malang, 1982.
- Khairul Umam, Achyar Aminuddin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Latupono, Barzah, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007.
- M. Friedman, Marilyn, *Family Nursing. Theory & Practice*, Jakarta: EGC, 1985.
- Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Marzuki, *Prinsip Dasar Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Yogyakarta: UIN Press, 2002.
- Nasikun, *Sistem Sosial Budaya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

- Nazir, M, *Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1987.
- Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2001.
- Sinambela, L. P, *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Singarimbun, M, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Seorjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana, 2009.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2002.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- , *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1995.
- Sudirman Abbas, Ahmad, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, Bandung: Alfabet, 2008.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Panamedia Group, 2011.
- Tobing, David M. L, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2007.
- Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, 2011.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Sudarsono, 2005.
- Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*”. Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

-----, Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan, dalam Ahkam: *Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017.

Departemen Perhubungan, *Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. Jakarta, 1996.

Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota dan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Jakarta, 1998.

Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1933 Tentang Fasilitas Parkiri Untuk Umum.

On-line

http://dishub.bandarlampungkota.go.id/konten-visi_misi.html

Wawancara

Afrully Rahmat, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 14 Oktober 2019.

Ahmad Hasan, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

Ahmad Husna, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 14 Oktober 2019.

Ali, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

Andri, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

Galih, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

Hartono Ali, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 14 Oktober 2019.

Nurdin, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

Rudi, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

Soleh, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Galang Dharma Jolian
NPM : 1521020123
Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Saran	Paraf	
				Pemb. I	Pemb. II
1		Perbaikan Proposal	-		
2		Revisi Kedua, Latar Belakang, Rumusan dan Daftar Pustaka	-		
3		Acc Proposal Pembimbing II	-		
4		Penegasan Judul, Latar Belakang, Rumusan, Footnote	-		
5		Acc Proposal Bab I Pembimbing I	-		
6		Bab I-V	Perbaikan Footnote, Penambahan Teori		

7		Perbaikan Bab II-III	Perbaikan penulisan ayat, Spasi		
8		Acc Pembimbing II	-		
9		Perbaikan Penulisan Bab II-V	-		
10		Revisi kedua	Penegasan pada analisis data		
11		Acc Pembimbing I untuk munaqosyah	-		
12					

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Shalihin, M.Ag.
NIP. 195707051989031001

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.
NIP. 197403072000121002

Galang Turnitin

by Muhammad Iqbal

Submission date: 05-Feb-2020 04:17AM (UTC+0900)

Submission ID: 1243576747

File name: Skipsi_Galang_Turnitin.docx (186.69K)

Word count: 12880

Character count: 81940

5 BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas perspektif pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul proposal dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul ini adalah “PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN LIAR PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran

¹ Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), dimana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu “peranan”.¹

2. Parkir Liar

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara². Dalam hal ini, parkir liar lebih tepatnya diartikan sebagai suatu kondisi dimana sebuah kendaraan diletakkan tidak sesuai dengan tempat yang disediakan.

¹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 20.

² Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996

3. Pungutan Liar

Secara umum, pengertian pungutan liar parkir adalah Pungutan parkir yang tidak resmi dan melanggar peraturan-peraturan yang artinya, yang tidak berizin dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

4. Perspektif

⁵ Suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena³.

5. Hukum Islam

⁶ Hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, adapun beberapa istilah hukum Islam tersebut antara lain:

a. Hukum

Secara sederhana diartikan sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegaskan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat.

b. Hukum dan *Ahkam*

³ Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30.

Kata hukum dalam bahasa Arab artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolak-ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut di atas dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu, memang erat sekali, sebab, setiap peraturan, apa pun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya⁴.

⁶ c. Syari'at

Yang dimaksud dengan *Syari'at* atau ditulis juga *Syari'ah*, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syari'at memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.⁵

d. Fiqh

⁶
Fiqh secara bahasa artinya paham atau pengertian. Sedangkan Ilmu Fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang dalil-dalilnya ⁶terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁶ Kemudian diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Menurut Mahmud Syaltut, dalil-dalil ini

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Malang: Penerbit IKIP Malang, 1982)

⁵ Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, 2011), h. 1.

⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Ed. 1, Cet. 3, h. 250.

⁶ diambil dari sumber hukum Islam. Sumber syari'at dalam Islam ada tiga sumber pokok, yaitu⁷ :

- 1) Al-Qur'an
- 2) As-Sunnah
- 3) Ar-Ra'yu

Ar-Ra'yu Yaitu suatu pendapat dari metode penelitian dari kandungan al-Qur'an dan Sunnah, serta mempertemukan antara hukum yang tidak terdapat teksnya dengan hukum yang telah ada teks hukumnya, juga termasuk penelitian tentang aplikasi/penerapan kaidah-kaidah kulliyah (global) yang diambil dari Juzziyatil Qur'aniy (bagian-bagian al-Qur'an) terhadap kasus-kasus yang dikemukakan. Sumber hukum⁸ Ar-Ra'yu terdapat beberapa kaidah ushul yang merupakan hasil dari ijtihad para sahabat dan ulama, antara lain: *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Al-Urf*, *Istishab* dan sebagainya. Dilingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum yaitu:

- a) *Syari'at*, yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan sesuatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya yang secara jelas terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.

⁷ Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, 2011), h. 18.

⁸ *Ibid*.

- b) *Fiqh*, yaitu ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syara bersifat perbuatan (yang difahami) dari dalil-dalil rinci atau hukum-hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dalil-dalilnya yang rinci (terutama ayat-ayat al-Qur'an dan hadits).
- c) *Siyasah Syar'iyah*, yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, yaitu melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama. Kemaslahatan itu dicapai melalui aturan yang telah disepakati oleh semua golongan masyarakat yang bersifat mengikat dan apabila melanggarnya dikenakan sanksi atau hukuman. Kewenangan pemerintah itu disebut *al-qawanun* (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari'at (agama).

5

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul proposal tersebut adalah:

1. Alasan Objektif

- a. Banyak terjadi fenomena pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung.
- b. Masyarakat seolah membiarkan fenomena pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung.
- c. Tidak ada aturan baku yang mengatur tentang masalah pungutan liar di Kota Bandar Lampung.

2. Alasan Subjektif

- a. Peneliti bisa menyelesaikan penelitian dengan tepat waktu.

- ⁵ b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian proposal skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, fenomena perparkiran sudah menjadi fenomena yang sering dijumpai di dalam sistem transportasi. Fenomena ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Kegiatan parkir itu sendiri adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara⁹.

Kemudian, kegiatan parkir juga dapat salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah dimana kegiatan parkir akan menghasilkan apa pajak/retribusi yang nantinya akan masuk ke dalam kas pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

⁹ Dirjen Perhubungan Darat, 1996

¹ Salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting adalah pajak parkir, sebagaimana disebutkan di dalam *Pasal 2 ayat (2) UU 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)* bahwa :

Pasal 2

2. *Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:*

- a. *Pajak Hotel;*
- b. *Pajak Restoran;*
- c. *Pajak Hiburan;*
- d. *Pajak Reklame;*
- e. *Pajak Penerangan Jalan;*
- f. *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
- g. *Pajak Parkir;*
- h. *Pajak Air Tanah;*
- i. *Pajak Sarang Burung Walet;*
- j. *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
- k. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*

Di dalam *Pasal 2 ayat (2) UU 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)* sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu pajak kabupaten/kota adalah pajak parkir (point g).

Berikut adalah data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak tahun 2013-2016 :

¹ Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan PAD dari sektor Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung.

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	%
2013	246.651.003.114,-	238.115.511.465,-	89,97
2014	283.050.000.000,-	241.130.668.603,-	85,19
2015	434.850.000.000,-	253.181.191.950,-	58,22
2016	519.869.360.000,-	324.667.322.496,-	62,45

Sumber : Data Dispenda Kota Bandar Lampung 2017 (Jazuli Wijaya)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian tertinggi dari realisasi penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir di Bandar Lampung adalah pada tahun 2013, yaitu 89,97%. Sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu 85,19%. Realisasi penerimaan terendah adalah pada tahun 2015 lalu mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 yaitu sebesar 62,45%, dengan demikian retribusi parkir turut memberikan andil dalam penerimaan PAD di Bandar Lampung.

Namun pada kenyataannya terdapat banyak sekali masalah parkir di Bandar Lampung, mulai dari adanya parkir liar serta pungutan liar terhadap parkir tersebut. Para oknum-oknum berparas sangar layaknya preman dan beratribut Dinas Perhubungan (Dishub) yang tidak resmi. Pada kasus serupa, dijelaskan bahwa di Jl. Letjen Suprpto, Tanjung Karang Bandar Lampung¹⁰. Pengguna jasa parkir mengaku resah karena juru parkir tersebut sering memaksa bahkan bertindak kasar sehingga hampir beradu fisik saat meminta pungutan parkir di jalan tersebut.

Lalu, sudah sejauh mana Pemerintah menanggulangi masalah tersebut, apa sajakah bentuk-bentuk penanggulangan pemerintah terhadap masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung ?berawal dari pertanyaan ini, akan dilakukan penelitian lebih lanjut yang tentunya akan dibahas dan dideskripsikan dalam konteks Hukum Islam.

¹⁰ *Harian Lampost*, 6 Oktober 2017

5

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pungutan liar parkir?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung dalam perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengkaji tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung dalam perspektif Hukum Islam

5

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan

akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- 3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini, maka akan didefinisikan metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dalam menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Metode penelitian adalah cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan yang baik. Berdasarkan keterangan tersebut maka jelas yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melakukan suatu perintah ilmiah sumber data.

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun data yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kaneh kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

2. Sumber Data

Sumber data adalah di mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer

- a. Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari

pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota ⁵ Bandar Lampung.

Data Sekunder

- b. **Data** sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber data asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah,

tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap pihak dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).

b. Metode Observasi

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

5 c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹¹ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2002), h.172.

5

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *purposive* sampling, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel dan lebih mudah untuk diteliti.¹² *Purposive Sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

5. Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian di satukan dan dibagi menjadi sub-sub data yang selanjutnya diproses untuk penyajian data pada hasil penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Maleong (1998) adalah:

a. Editing

Teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.¹³ Setelah data-data yang didapatkan melalui wawancara mendalam pada para narasumber maupun hasil observasi.

b. Interpretasi

¹² Sugyano, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 82.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2002), h.172.

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan. Teori-teori relevan didapatkan melalui sumber pustaka, bahan bacaan, maupun bentuk penelitian-penelitian sebelumnya.

6. ⁵Metode Analisis Masalah

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif adalah cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

G. Tinjauan Pustaka

1. ¹Tinjauan Tentang Pungutan Liar

a. Definisi Pungutan Liar Secara Umum

Menurut Soedjono (1983), Pungli berasal dari bahasa Cina, “*Li*” artinya keuntungan dan “*Pung*” artinya persembahan. Jadi pungli diucapkan dengan Pungli, artinya adalah mempersembahkan keuntungan. Pengertian pungutan dalam KBBI adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang dan pengertian liar dalam KBBI adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum, pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta uang atau barang yang dilakukan secara tidak tertata, tidak berizin resmi, dan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut, hal ini sering disamakan dengan pemerasan.

Jika ingin dikaji lebih dalam lagi, pungutan liar juga mengarah kepada adanya pemberian sesuatu baik uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah organisasi (*organized crimes*) atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu dengan tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.

Sehingga dapat kita cermati apabila benda atau fasilitas yang sudah ada sebelumnya sudah dalam kuasa oknum tersebut dan pengambilan tanpa sepengetahuan pemberi maka hal tersebut menjurus kepada penggelapan atau korupsi. Pungli bisa terjadi apabila adanya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak. Apabila pemungutan tersebut terkesan dipaksakan oleh satu pihak maka perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan pemerasan.

¹
b. Definisi Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Positif

Telah tertuang beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta penjelasan tentang pungutan liar, di antaranya sebagai berikut:

1) Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan

kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, karena pemerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2) **Pasal 378**

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan-perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, dengan :

- a) Memakai nama palsu atau martabat palsu
- b) Tipu muslihat
- c) Rangkaian kebohongan.

Pasal ini perlu ikut serta diterapkan dalam praktik pungutan liar, mengingat oknum dari pungutan liar tersebut adalah oknum masyarakat sipil yang diperalat oleh oknum pegawai negeri sebagai orang ketiga selaku penghubung dalam praktiknya.

3) Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut pasal yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

2. Tinjauan Tentang Parkir

a. Pengertian Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara¹⁴. Dasar tujuan dan penetapan lokasi mengenai peraturan parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor yang kemudian

¹⁴ *Op.Cit*

tertuang di dalam Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 yang berbunyi :

1 Tujuan utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,
- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir,
- 3) Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
- 4) Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, dan
- 5) Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Rencana umum tata ruang daerah;
- 2) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- 3) Kelestarian lingkungan;
- 4) Kemudahan bagi pengguna jasa.

b. Kebijakan Parkir

1) Pengertian Kebijakan

Pada Perda No. 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Parkir, Kebijakan (*policy*) pada umumnya menunjukkan kepada prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian tertentu. Dengan demikian, setiap studi tentang kebijakan seharusnya menyangkut tiga hal pokok, yaitu :

- a) Apa yang diinginkan (tujuan).
- b) Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut (sarana).
- c) Siapa yang menjalankan (jenis kelompok yang bersangkutan).

2) Instrumen Kebijakan Parkir

Berikut adalah Instrumen Kebijakan Parkir yang dapat digunakan untuk mempengaruhi penyelenggaraan parkir, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Instrumen kebijakan di bidang parkir sebagai berikut.

Tabel 2.1. Instrumen Kebijakan Parkir

Kebijakan	Dipinggir Jalan (on street)	Diluar Jalan (off street)
Kebijakan Tarif Parkir	Peningkatan Tarif Penggunaan Meter Parkir Izin Penggunaan	Pajak terhadap penyediaan ruang parkir Struktur tarif untuk mempengaruhi minat pemarkir lama untuk parkir
Kebijakan Pembatasan	Melarang parkir Melarang parkir dengan pengecualian kepada penghuni Relokasi tempat parkir	Membekukan tempat pembangunan parkir baru Mengurangi ruang parkir yang ada Mengendalikan parkir dimasa mendatang. Variasi waktu buka ruang parkir Relokasi tempat parkir

Sumber : Perda No. 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Parkir

Sedangkan untuk pemilihan Instrumen dapat ditentukan berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang berkaitan dengan hal yang menyebabkan munculnya Kebijakan di atas. Sebagai contoh, ketika terdapat permasalahan pada kurangnya lahan parkir, maka dibuat Kebijakan Pembatasan berupa Relokasi Tempat Parkir.

3) Pengendalian Harga/Tarif Parkir

Penetapan harga oleh pemerintah dianggap sebagai metode yang bisa digunakan sebagai pengendalian pelayanan parkir. Penetapan harga

diberlakukan secara umum atau juga diberlakukan dari jenis pelayanan tertentu.

a) Alat Pengendalian Parkir

Pembatasan parkir khususnya di jalan biasanya menurut lokasi dan waktunya, tetapi hal yang memerlukan penegakan dan penindakan yang tegas. Metode-metode pengendalian parkir yang umum dilakukan yaitu :

1. Sistem Karcis

Pada sistem ini, para pengemudi yang akan memarkirkan kendaraannya akan mendapatkan karcis dari juru parkir ataupun mesin parkir di mana di dalam karcis tersebut tertulis identitas kendaraan dan waktu kendaraan memasuki area parkir.

2. ¹ Surat Izin Parkir Perumahan/Perkantoran

Surat izin ini umumnya berbentuk stiker yang di tempel di bagian kaca depan kendaraan sebagai tanda bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah penghuni perumahan atau kompleks tertentu.

3. Alat Pengukur Parkir

Terdiri atas jam pengukur waktu, di mana jam ini berfungsi untuk mengukur lamanya parkir dan jam tersebut akan berputar sesuai dengan uang yang dimasukkan oleh pengendara (jadi seolah-olah pengendara membeli waktu yang digunakan untuk parkir). Dalam penerapannya harus dikawal oleh petugas yang bertugas mengawasi secara kontinu kepada pengendara dan akan

memberikan sanksi tilang bagi pelanggar dan surat tilang akan dijepitkan di antara kaca dan *wiper* mobil.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

Pengertian Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.¹⁵ Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

1. Peran Formal (Peran yang Nampak Jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai *provider* (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.

2. Peran Informal (Peran Tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran

¹⁵ Marilyn M. Friedman, *Family Nursing. Theory & Practice*, (Jakarta: EGC, 1992), h. 286.

¹⁶ *Ibid.*

informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto dalam buku “Sosiologi Suatu Pengantar” mengatakan bahwa Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

B. Parkir

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri di tempat parkir, oleh karena itu ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan bisa di garasi mobil, di halaman, dan di tujuan perjalanan, di pelataran parkir, gedung parkir ataupun di tepi jalan. Karena konsentrasi tujuan perjalanan lebih tinggi daripada tempat asal perjalanan, maka biasanya menjadi permasalahan di tempat tujuan permasalahan. Namun sebelum lebih jauh kita harus mengetahui terlebih

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 217.

dahulu definisi parkir dan stop/berhenti, parkir adalah Suatu keadaan di mana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu (tidak bersifat sementara) PP No. 43 Tahun 1993.

⁹ Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya diparkir di tempat, di mana di tempat mudah untuk dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Dengan demikian untuk mendesain suatu area parkir di badan jalan ada 2 pilihan yakni pola paralel dan menyudut.

Dalam kaitannya antara hukum dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya di areal parkir baik itu *on street parking* maupun *off street parking*, sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir.

Parkir *on street* sepenuhnya dikelola oleh BP (Badan Pengelola) Parkir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, dengan demikian hubungan hukum yang berlaku antara BP parkir dan konsumen parkir *on street* didasarkan pada hukum objektif. Para konsumen yang memakai tempat parkir *on street* ini akan membayar biaya parkir yang disebut dengan retribusi parkir. Retribusi adalah pungutan yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat atau daerah sehubungan dengan penggunaan fasilitas negara¹⁸. Dapat dikatakan pembayaran

¹⁸ David M. L Tobing, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2007), h. 1.

tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah¹⁹.

⁹ Selain parkir *on street* juga dikenal parkir di luar bahu jalan yaitu *off street*. Yang dimaksud dengan di luar bahu jalan antara lain pada kawasan tertentu seperti pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.²⁰ Parkir *off street* dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum maupun Warga Negara Indonesia dengan mendapatkan izin penyelenggaraan parkir baik murni maupun perpanjangan yang diberikan oleh gubernur (BP Parkir) dengan suatu kerja sama bagi hasil. Pada parkir *off street* terdapat beberapa hubungan selain hubungan hukum antara pengelola parkir dengan BP parkir. Pada umumnya pengelola parkir tidak memiliki areal atau gedung sendiri melainkan menjalin kerja sama dengan pemilik atau pengelola gedung/areal parkir tertentu.

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur dalam pasal 1694 KUHPerdata. Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian lainnya yang umumnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal pokok dari perjanjian itu.²¹

¹⁹ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Eresco, 1993), h. 7.

²⁰ Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas Jalan.

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1995), h. 107.

Dalam pasal 1706 KUHPerdara diwajibkan bagi si penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memelihara dengan minat yang seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi pasal 1714 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab pengelola parkir, terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen seperti keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

11

1. Parkir Liar

Parkir liar adalah merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah parkir liar harus ditata oleh Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati) setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelola parkir perkantoran.

11

Secara langsung dapat dibedakan antara parkir liar dan parkir resmi selain dari lokasi parkir, juga kepada petugas parkir. Petugas parkir resmi adalah petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dengan bukti memiliki Surat Keputusan (SK) dalam melakukan parkir.

¹¹ Parkir liar biasanya adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir. ¹¹ Ketentuan mengenai parkir tepi jalan adalah sebagai berikut²²:

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
- b. Pada jalan yang sempit yang lebarnya kurang dari 6 meter dan mengizinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan dengan lebar 6-9 meter.
- c. Pada jalan di mana arus lalu lintas dipentingkan maka parkir sebaiknya dilarang.
- d. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter.
- e. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan.
- f. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang.
- g. Di dalam daerah persimpangan dengan jarak sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.

Pengendalian terhadap petugas parkir ilegal perlu untuk dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi lokasi parkir yang dikelola oleh petugas parkir ilegal, baik di tempat yang ditunjuk sebagai lokasi parkir ataupun tempat-tempat yang tidak ditunjuk sebagai lokasi parkir. Bila ditemukan petugas parkir yang demikian maka perlu diambil langkah pengendalian. Agar langkah pengendalian ini mempunyai kekuatan hukum maka ketentuan

²² Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota dan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir (1998)

mengenai hal ini harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah mengenai perparkiran.

2. Kebijakan Parkir

¹¹ Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut²³:

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir,
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, dan
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Keberadaan kebijakan parkir adalah agar pengaturan mengenai dasar hukum yang jelas. Kebijakan parkir dengan adanya otonomi daerah dapat direpresentasikan dalam bentuk peraturan daerah (perda) maupun Peraturan Walikota (perwali). Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat tetapi harus tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

² C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa

²³ *Ibid.*

kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad SAW yaitu al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara" sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum²⁴.

²⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.²⁵ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.²⁶

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari'at Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah SAW). Sebagian besar pendapat ulama ilmu fiqh sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist. Di samping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam berdasarkan Ra'yu yaitu : ijma', ijtihad, istishab, istislah, istihsan, maslahat mursalah, qiyas, dan 'urf.²⁷

²⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 10

²⁶ Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017, hal. 322

²⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Sudarsono, 2005), h. 13.

Kemudian menurut Abuddin Nata sumber hukum Islam dibagi menjadi tiga, di antaranya:²⁸

2

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.²⁹

Al-Qur'an memuat pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu:

- 1) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- 2) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- 3) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.

²⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Ed. 1, Cet. 3, h. 67.

²⁹ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah al-„Arabiyah, 1971), hal. 50

- 4) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

Isi Kandungan Al-Qur'an

1) Segi Kuantitas

Al Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata.

2) Segi Kualitas

Isi pokok Al-Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian :

- a) Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyyah dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
- b) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.
- c) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela.³⁰

b. Hadits

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 235.

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (Q.S Al Hashr : 7)

Perintah untuk meneladani ini seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat

garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh rasullah SAW dalam haditsnya.

Contoh hadits sebagai penjelas al-Qur'an, tentang mengharamkan bangkai, darah dan daging babi dalam Q.S al-Ma'idah [5]: 3)

أُجِلَّتْ لَكُمْ مِيتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ
فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya: "Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati (lever) dan limpa. (HR Ibnu Majah no. 3314 dan dishahihkan Syeikh Al Albani dalam Silsilah al-Ahadits al-Shohihah no.1118)

13

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.³¹

Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama Muadz bin jabal ketika diutus ke negeri Yaman. "Nabi SAW bertanya kepada Muadz, bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?"

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15

Muadz menjawab, Saya akan menetapkan hukum dengan al-Qur'an, Rasul bertanya lagi, Seandainya tidak ditemukan ketetapan di dalam al-Qur'an? Muadz menjawab, Saya akan tetapkan dengan Hadits. Rasul bertanya lagi, seandainya tidak engkau temukan ketetapan dalam Al-Qur'an dan Hadits Muadz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri kemudian Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bin Jabal tanda setuju".³² Kisah mengenai Muadz ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah al-Qur'an dan hadits.

d. Qiyas

² Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.³³ Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam al-Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu :

³² Khairul Umam, Achyar Aminuddin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 133.

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 17.

- 1) Dasar (dalil)
- 2) Masalah yang akan diqiyaskan
- 3) Hukum yang terdapat pada dalil
- 4) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

²
e. Masalah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, masalah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada teks khusus (teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam al-Qur'an dan Hadits disebut masalah *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah *mulgah* (batal). Sementara itu, masalah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembenarannya secara langsung.³⁴

²
Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr, 1986), h. 858.

Bahkan di zaman Nabi SAW dan beberapa abad lamanya sepeninggal beliau umat Islam tidak mencatat nikahnya. Namun demikian, tidak ada larangan mencatatkannya. Justru dengan mencatatkan nikah itu akan terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar dan masyarakat terhindar dari kemudharatan. Atas dasar kebaikan dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa ijihad hukum Islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh masalah mursalah.

f. *Istihsa>n*

Secara harfiah, *istihsa>n* berarti memandang baik dalam teori hukum Islam, *istihsa>n* merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau pengecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul Fiqh, *istihsa>n* diartikan sebagai Meninggalkan suatu ketentuan hukum umum yang berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya dalil syara' untuk melakukan hal demikian.³⁵

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 19.

² Misalnya, aturan umum dalam hukum Islam adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Hak ini dilarang oleh Nabi SAW dalam sebuah haditsnya:

تَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Artinya: “Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum kafir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta.” (Muttafaqun alaih H.R. Bukhari No. 2772 dan Muslim No. 1632)

² Akan tetapi, dalam keadaan khusus di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang, maka wakaf diperbolehkan dijual dengan melanggar aturan umum mengenai larangan menjual wakaf itu.

Jadi, dibolehkan menjual harta wakaf dalam kasus ini didasarkan kepada *istihsa>n*, yaitu tindakan mengambil kebijaksanaan hukum berdasarkan suatu alasan hukum (dalil) yang menghendaki hal itu dilakukan. Pada intinya, *istihsa>n* merupakan suatu upaya mengatasi kelakuan penerapan logis aturan umum, di mana apabila penerapan aturan umum itu dalam kasus tertentu tidak lagi dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi.

g. *Istisha>b*

²
Istisha>b berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang dia masih hidup sampai diketahui dan terbukti dia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.³⁶

Istisha>b ada tiga macam, yaitu : (1) kelangsungan status hukum kebolehan umum, (2) kelangsungan kebebasan asli dan (3) kelangsungan hukum yang sudah ada. Yang dimaksud dengan *istisha>b* jenis pertama, yaitu kelangsungan kebolehan umum adalah bahwa segala sesuatu di luar tindakan ritual ibadah asas umumnya adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ ٢٩

Artinya: ² Dialah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu. (Q.S. al-Baqarah [2]: 29).

Dari sini, kemudian dirumuskan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

"Pada asanya segala sesuatu itu (di luar ibadah) boleh hukumnya sampai ada dalil yang melarang"

³⁶ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana Penamedia Group, 2010), h.158.

² Dalam bidang akad (perjanjian), misalnya dari asas kebebasan umum ini timbullah prinsip kebebasan berkontrak, yaitu bahwa orang pada dasarnya dibolehkan untuk membuat jenis akad (perjanjian) baru apa saja dan mengisi ke dalamnya klausul apa pun sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar ketentuan yang sudah ada.

Istisha>b jenis kedua, yaitu kelangsungan kebebasan yang asli, menyatakan bahwa *dzimmah* seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan lain. Misalnya dalam hal utang-piutang seseorang ditagih utang oleh orang lain dan orang lain itu tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan atas adanya utang itu, maka orang yang ditagih dianggap bebas dari kewajiban hutang itu sesuai dengan prinsip kebebasan asli dari beban-beban dan tuntutan-tuntutan yang dimilikinya. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi *al-ashlu bara>'atudz-dzimmah* ² (Asasnya adalah kebebasan *dzimmah* (tanggung jawab hukum)).³⁷

Istisha>b jenis ketiga, yaitu kelangsungan hukum adalah bahwa status hukum yang sudah ada di asalnya terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lain. Termasuk kategori ini adalah ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada tetap terus berlaku sampai ada ketentuan baru yang menentukan lain. Dari prinsip *Istisha>b* ini

³⁷ *Ibid.*, h. 160.

secara umum dirumuskan kaidah hukum Islam yang berbunyi *al-ashlu baqa> 'u ma> ka>na ala ma> ka>na* (Asasnya adalah berlangsungnya suatu yang telah ada itu sebagai mana adanya).

h. ² *Syaddudz-dzari>'ah* (Tindakan Preventif)

Secara harfiah, *Syaddudz-dzari>'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum Islam, *Syaddudz-dzari>'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul Fiqh mendefinisikan *Syaddudz-dzari>'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung kemaslahatan.³⁸

i. ² 'Urf (Adat)

Adat atau '*urf*' dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teks syariah atau *Ijma>'*. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal.457

kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan teks atau *Ijma*>'.³⁹

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan teks (al-Qur'an dan Hadits) atau *Ijma*>' (konsensus); dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum Islam adalah ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam Surat al-A'raf [7]: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

j. Perkataan Sahabat Nabi SAW

Sahabat nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Perkataan Sahabat Nabi SAW adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah di mana tidak terdapat penegasan dalam al-Qur'an, Hadits Nabi SAW ataupun dalam *Ijma*>'.

³⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), hal.16

Apabila Perkataan Sahabat bukan merupakan ijtihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Perkataan tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan *Ijma*⁴⁰, maka dapat menjadi sumber hukum.⁴⁰ Akan tetapi, apabila Perkataan Sahabat merupakan hasil ijtihad murni, maka Perkataan tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum Islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah az-Zuhaili adalah bahwa Perkataan murni Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.

k. Hukum Agama Samawi (Langit) Terdahulu

Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS dan Nabi Musa AS. Apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama Islam, maka tidak menjadi sumber hukum Islam.⁴¹

Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum Islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam al-

⁴⁰ Barzah Latupono, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), h. 50.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), h. 416.

Qur'an atau Hadits sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariatan hukum. Mengenai ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum dan tidak.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu:⁴² 1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, Ketentuannya telah di atur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya. Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan dan tata cara beribadat. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. seperti, iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
2. Hukum kemasyarakatan, Adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu.

⁴² Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika), h. 6-7.

Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: *Mu'a>malah*, *muna>kaha>t*, dan *'uqu>ba>t*.⁴³

- a. *Mu'a>malah* mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).
- b. *muna>kaha>t*, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum perdata.
- c. *'uqu>ba>t* atau *jina>>ya>>t*, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya. Selain bagian-bagian tersebut, ada bagian lain yaitu, mukhsamat, dan *ahka>m al-sultha>niyyah*.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang *Mu'a>malah* ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik.

⁴³ Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, 2011), h. 3.

Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, *muna>kaha>t*, *wira>sah*, *Mu'a>malah* dalam arti khusus, *jina>>ya>>t* atau *'uqu>ba>t*, *ahka>m al-sultha>niyyah* (*khila>>fah*) dan *mukha>samat*.⁴⁴

¹⁰ Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum eks Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diuraikan pada pembagian hukum menurut daya kerjanya, maka susunan hukum *mu'a>malah* dalam arti luas adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Hukum perdata Islam adalah mencakup beberapa bidang;
 - 1) *Muna>kaha>t* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya;
 - 2) *Wira>sah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini biasa juga disebut juga hukum *fara>'id*.
 - 3) *Mu'a>malah* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.
2. Adapun Hukum publik Islam mencakup beberapa bidang di antaranya;

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 21.

1) *jina>>ya>>t*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudu>d* maupun dalam *jarimah ta'zi>>r*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengertian *hudu>d* jamak dari had yang artinya batas. *Jarimah ta'zi>>r* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Sedangkan menurut bahasa arti *ta'zi>>r* adalah ajaran atau pengajaran

2) *Al-Ahka>m al-sultha>niyyah*, membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya;

4) *Mukha>samat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

4. Fungsi Hukum Islam

a. Fungsi ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

b. Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum Allah dengan subjek dan objek hukum (perbuatan mukalaf). Penetap hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

c. Fungsi *Zawajir*

¹³ Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. *Qishash*, *Diyat*, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, *hudud* untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, *qadhaf*, *hirabah*, dan *riddah*), dan *ta'zir* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.⁴⁶

d. Fungsi *Tanzhim al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), h. 418

Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah *Mu'a>malah*, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, h. 45.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Profil dan Sejarah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105 °28' sampa dengan 105°37' bujur timur.

Ibu kota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak diujung selatan pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km². Secara administratif kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Betung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin kabupaten Pesawaran.

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari:

- a. Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian Selatan.
- b. Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara.
- c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk betung bagian Utara.
- d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung.
- e. Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadana Ham, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Tabel 3.1. Jumlah Letak Geografi dan Topografi Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Letak Geografi		Topografi	
		Pantai	Bukan Pantai	Datar	Berbukit
1.	Teluk Betung Barat	3	5	7	1
2.	Teluk Betung Selatan	4	7	7	4
3.	Panjang	5	2	-	7
4.	Tanjung Karang Timur	-	11	10	1
5.	Teluk Betung Utara	-	10	8	2
6.	Tanjung Karang Pusat	-	11	10	1
7.	Tanjung Karang Barat	-	6	2	4
8.	Kemiling	-	7	2	5
9.	Kedaton	-	8	8	-
10.	Rajabasa	-	4	4	-
11.	Tanjung Seneng	-	4	4	-
12.	Sukarame	-	5	5	-
13.	Sukabumi	-	6	5	1
	Jumlah	12	86	72	26

Sumber (BPS Tahun 2018)

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No.14 Tahun 1964, keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi provinsi Lampung dengan ibu kotanya Tanjung Karang-Teluk Betung diganti namanya menjadi Kota madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi kota Bandar Lampung.

¹ Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan diwilayah kota Bandar Lampung, maka kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 84 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Tabel 3.2. Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Teluk Betung Barat	20,99
2.	Teluk Betung Selatan	10,07
3.	Panjang	21,16
4.	Tanjung Karang Timur	21,11
5.	Teluk Betung Utara	10,38
6.	Tanjung Karang Pusat	6,68
7.	Tanjung Karang Barat	15,14
8.	Kemiling	27,65
9.	Kedaton	10,88
10.	Rajabasa	13,02
11.	Tanjung Seneng	11,63
12.	Sukarame	16,87
13.	Sukabumi	1,64

Sumber : BPS 2018

Sejak tahun 1965 sampai saat ini kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH tingkat II berturut-turut sebagai berikut:

1. Sumarsono (Periode 1956-1957)
2. H. Zainal Abidin Pagar Alam (Periode 1957-1963)
3. Alimudin Umar, S.H. (Periode 1963-1969)
4. Drs. H.M. Thabrani Daud (Periode 1976-1981)
5. Drs. Fauzi Saleh (Periode 1976-1981)
6. Drs. H. Zulkarnain Subing (Periode 1981-1986)
7. Drs. H.A. Nurdin Hidayat (Periode 1986-1995)
8. Drs. H. Sunarto (Periode 1995-2005)
9. Edy Sutrisno, S.Pd., M.Pd. (Periode 2005-2010)
10. Drs. H. Herman HN, MM (Periode 2010-Sekarang)

2. Pemerintahan

Secara administrasi kota Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan, 98 kelurahan, 248 lingkungan, dan 2.679 RT dengan klasifikasi kelurahan swasembada. Secara Umum Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang berjenis kelamin perempuan cenderung lebih banyak dibanding pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan diperhitungkan dalam pemerintahan Kota Bandar Lampung.

¹ Tabel 3.3. Jumlah Kelurahan, Lingkungan dan RT Kecamatan di Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	RT
1.	Teluk Betung Barat	8	23	163
2.	Teluk Betung Selatan	11	26	313
3.	Panjang	7	18	211
4.	Tanjung Karang Timur	11	25	274
5.	Teluk Betung Barat	10	21	240
6.	Tanjung Karang Pusat	1	26	257
7.	Tanjung Karang Barat	6	5	162
8.	Kemiling	7	20	264
9.	Kedaton	8	23	256
10.	Rajabasa	4	10	101
11.	Tanjung Seneng	4	10	100
12.	Sukarame	5	14	273
13.	Sukabumi	6	17	165
Jumlah		98	248	2.679

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2018)

³ B. Gambaran Umum Dishub Kota Bandar Lampung

1. Profil dan Sejarah

³ Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) nomor 12 tahun 2000 tentang organisasi dinas-dinas Daerah, tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang sebelumnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dinas LLAJ) sekaligus melakukan tugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

¹ Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut, Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan serta Bidang Perparkiran dan tugas pembantuan. Dilihat dari sejarahnya dinas perhubungan kota bandar lampung yang sebelumnya dinas lalu lintas dan angkutan jalan dipimpin oleh, sebagai berikut:

1. I Nengah Madra, S.H.
2. Darwis Ali, S.H.
3. Drs. Zainal Fanani Idris
4. Drs. Zainal Abidin Hasan
5. Ruslan HD, S.E.
6. Ir. Eddy D. Saleh
7. Drs. Normansyah, M.Si.
8. Rifa I, S.H.
9. Kadek Sumarta, S.Sos., M.M.
10. Ir. Ibrahim, M.M.

11. Ahmad Husna, S. Stp., M.H.

2. Visi dan Misi

a. ¹² Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu Instansi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan Instansi selanjutnya. Kehidupan Instansi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi Instansi harus dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah :

" TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI YANG HANDAL "

Artinya :

“Sistem transportasi yang handal memiliki arti bahwa pengembangan sistem transportasi di Kota Bandar Lampung mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakat Kota Bandar Lampung karena masyarakat berharap bahwa dengan sistem transportasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dapat mengurangi dan mengurai kemacetan yang timbul akibat tidak seimbangnya jumlah kendaraan dan panjang jalan yang ada”.

b. Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan. Agar tujuan Dinas dapat terlaksana dan berhasil dengan baik untuk tercapainya Visi tersebut telah disusun Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai.

Adapun Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah :

1. Terwujudnya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali.
2. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman.
3. Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

Struktur Organisasi.⁴⁸

3. Struktur dan Sumber Daya

³ Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung dibidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dari tata kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Bandar Lampung.

⁴⁸ http://dishub.bandarlampungkota.go.id/konten-visi_misi.html

- 3
b. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana teknis bidang perhubungan berada di bawah tanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung. Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Perhubungan

b. Sekretaris Dinas Perhubungan, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Sub Bagian Program dan Informasi

c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa
2. Seksi Perlengkapan Jalan¹
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

d. Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut, terdiri dari:

1. Seksi Angkutan Orang
2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus
3. Seksi Perhubungan Laut

e. Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan, terdiri dari:

1. Seksi Teknis Sarana
2. Seksi Teknis Prasarana

3. Seksi Pembinaan Keselamatan

f. Bidang Perhubungan Laut, Terdiri dari:

1. Seksi Pendapatan Perparkiran

2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Parkir

3. Seksi Pendapatan Perparkiran

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

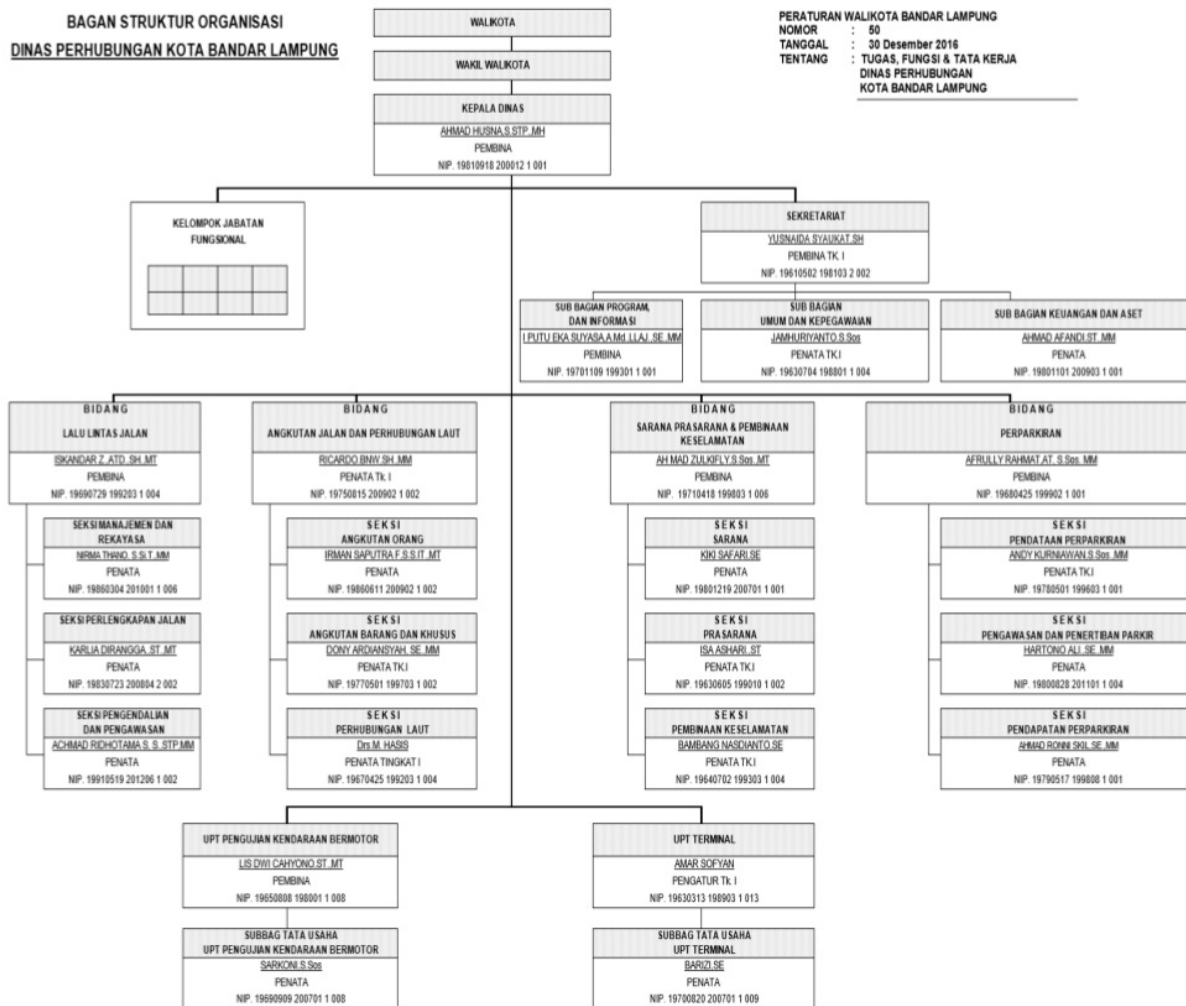
terdiri dari:

1. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal

2. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG



(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2018)

3

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan sebanyak 395 yang dibagi menjadi

beberapa golongan yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Jumlah Karyawan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

No.	Unsur	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	

	GOL IV	6 Pegawai
	GOL III	82 Pegawai
	GOL II	53 Pegawai
	GOL I	53 Pegawai
2.	Pegawai Tenaga Kontrak (PTK)	112 Pegawai
	Jumlah	395 Pegawai

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2018)

4. Kebijakan Dishub Kota Bandar Lampung

Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi Dinas. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Kebijakan Internal

- a. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
- b. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

- c. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan Level of Service, kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan.
- d. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas.
- e. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun prasarana terminal yang representatif.
- f. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut.
- g. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan.
- i. Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.
- j. Untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

2. Kebijakan Eksternal

- a. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya transportasi.
- b. Pembinaan terhadap pemilik pengusaha angkutan yang berdomisili di dalam Kota Bandar Lampung.
- c. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi.
- d. Pembangunan lanjutan terminal tipe A Rajabasa.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengawasan perusahaan daerah (PD) parkir dalam penertiban parkir liar di sepanjang jalan Kota Bandar Lampung yang dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan didukung oleh beberapa dokumen. Di mana pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam bentuk wawancara dan memperoleh respon pertanyaan yang positif dari para responden. Pengawasan instansi pemerintahan seperti kantor Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Bandar Lampung dalam penertiban parkir liar di sepanjang jalan.

⁷ Namun seperti yang kita lihat saat ini, masih ada lahan parkir yang tidak semestinya atau dengan kata lain di paksakan sebagai lahan parkir. Tidak hanya di beberapa lokasi parkir yang tidak resmi, tetapi ada juga di beberapa lokasi parkir resmi. Hal ini disebabkan oleh karena ⁷ pengunjung yang akan datang, terutama di gedung atau di kantor yang sudah seharusnya memiliki lahan parkir yang luas dan memadai dan ⁷ juru parkir liar tidak menggunakan atribut dan identitas sebagai juru parkir resmi, dan ⁷ dapat kita lihat bahwa kerja sama antara Perusahaan Daerah (PD) parkir dengan pihak kepolisian masih kurang maksimal, karena pihak kepolisian seakan masih membiarkan adanya parkir liar yang seharusnya sudah ditangani oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir.

Pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung kurang maksimal dalam menjalankan pengawasannya seperti ⁴ pengawasan preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi. Pengawasan preventif artinya tindakan menjaga atau pemecahan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Perhubungan terhadap situasi dan

4 kondisi di lapangan. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan dapat mencegah atau setidaknya segera dapat mengetahui, memperbaiki atau mengatasi setiap penyimpangan, penyelewengan, pemborosan atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien dan efektif. Salah satu tujuan lahirnya Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 64 Tahun 2011 adalah untuk memperlancar arus kendaraan dan meminimalisir kemacetan sekarang maupun di masa yang akan datang. Adapun bentuk pengawasan Preventif adalah sebagai berikut: (1) sosialisasi, (2) teguran simpatik dan pengawasan represif yaitu patroli. Seperti halnya pengawasan preventif yaitu Sosialisasi adalah penyampaian atau memperkenalkan aturan Perwali tentang larangan parkir, baik dan bentuk ucapan maupun tulisan kepada seluruh masyarakat untuk tegas dalam menegakkan aturan, meskipun demikian masih banyak jukir liar yang tidak sadar atau bahkan tidak mengetahui bahwa lokasi jalan tersebut sudah dilarang. Ini pun perlu di sadari oleh pemerintah bahwa terjadinya pelanggaran itu bisa dikarenakan oleh sosialisasi yang kurang mengenai sasaran. Hal ini dibuktikan oleh wawancara penulis dengan informan yang berada di lapangan, yang dilakukan di seputar tempat parkir kota bandar lampung.

Menurut bapak Ahmad Hasan jukir Indomart Sukabumi, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota bandar lampung terhadap praktik-praktik pungutan liar parkir hanya dilakukan beberapa kali. Akan tetapi dinas perhubungan tidak konsisten dalam pengawasannya karena mereka

melakukan swiping terhadap praktik pungutan parkir liar tidak menentu kadang mengawasi dan kadang tidak hingga berminggu-minggu.⁴⁹

Menurut bapak Andri pegawai Indomart sukabumi, bahwa himbauan atau larangan-larangan terkait persoalan pungutan parkir liar yang dilakukan dinas perhubungan berupa slogan dan spanduk bahkan tidak ada. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya parkir liar yang dilakukan di Indomart Sukabumi.⁵⁰

Dilain pihak, Menanggapi persoalan ini Dishub sebagai pihak wewenang melalui, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung 14 Oktober, Ahmad Husna mengakui telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penertiban terhadap juru parkir liar. Namun, mereka (para juru parkir liar) selalu '*kucing-kucingan*' dengan petugas. "Kami memang selalu memburu dan sering melakukan penertiban, tapi juru parkir liar ini setelah ditertibkan, mereka kembali lagi".⁵¹

Bahkan Pihak Dinas Perhubungan melalui bidang perparkiran telah melakukan sosialisasi kepada para juru parkir liar dengan cara menyampaikan secara lisan berupa teguran-teguran serta pemasangan spanduk himbauan.⁵²

Berdasarkan hasil observasi peneliti adanya beberapa spanduk yang berisi tentang Larangan Parkir Liar. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui oleh Masyarakat pengguna jalan Balai kota. Pemerintah harus secara giat melakukan

⁴⁹ Ahmad Hasan, wawancara dengan penulis, Indomaret S.A. Tirtayasa, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

⁵⁰ Andri, wawancara dengan penulis, Indomaret S.A. Tirtayasa, Bandar Lampung, 20 Oktober 2019.

⁵¹ Ahmad Husna, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 14 Oktober 2019.

⁵² Afrully Rahmat, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 14 Oktober 2019.

4 sosialisasi dengan berbagai macam cara salah satunya pemerintah harus kembali melakukan pemasangan stiker di setiap kendaraan agar sosialisasi aturan pemerintah ini 4 bisa tersampaikan kepada khalayak masyarakat umum. Meskipun sebelumnya pemerintah gencar melakukan sosialisasi akan tetapi itu hanya berjalan beberapa bulan dan tidak secara terus.

4 Jika memang demikian seharusnya sampai sekarang himbauan itu tetap ada dipampang di pelataran jalan Kota Bandar Lampung. 4 Sehingga ketika masyarakat pengguna jalan yang memang baru melewati kawasan itu dapat mereka ketahui. Jika spanduk itu hanya dipasang dalam beberapa hari saja kemungkinan juga yang membacanya hanya beberapa orang juga.

Pelaksana pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting adalah pengawasan parkir antara lain meliputi patroli oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir, Dinas Perhubungan mengawasi bersama kepolisian setempat melakukan pengawasan represif agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar yang melanggar peraturan pemerintah tentang larangan parkir. Kemudian menyampaikan surat teguran berbentuk sosialisasi untuk menyampaikan surat teguran telah dilakukan oleh pihak.

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Bandar Lampung telah menyampaikan surat teguran serta rambu-rambu larangan parkir di sepanjang jalan Balai Kota Bandar Lampung. Seolah dicuekin oleh para juru parkir liar apalagi para 4 pengendara angkutan kota (angkot) jenis pete-pete dan mobil pribadi apalagi motor

yang tetap parkir, seperti terlihat di depan Kantor Wali Kota Bandar Lampung dan lainnya di sepanjang jalan Kota Bandar Lampung.

Penyampaian surat teguran larangan parkir masih sangat sedikit dan pemerintah dalam hal ini Peraturan Daerah (PD) parkir harus jeli melihat keadaan tempat-tempat titik parkir. Bila perlu ditampilkan juga sanksi yang akan diberikan kepada pengguna jalan apabila melanggar aturan tersebut. Peneliti melihat hanya ada beberapa jukir yang mendapat surat teguran larangan yang telah diberikan oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir.

Sesuai dengan observasi peneliti bahwa penyampaian surat teguran yang diberikan itu masih belum kuat dalam penertiban parkir liar. Teguran simpatik yang dimaksud dengan teguran simpatik adalah peneguran yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir kepada parkir liar yang memakai badan jalan sebagai tempat parkir. Tindakan peneguran ini dilakukan agar memberikan perhatian penuh kepada masyarakat tentang pelaksanaan aturan Walikota No. 64 Tahun 2011 itu, sehingga ada harapan ke depan tidak ada lagi parkir-parkir liar.

Perusahaan Daerah (PD) parkir melakukan peneguran kepada juru parkir liar yang diketahui melanggar atau parkir di bahu jalan. Bentuk teguran simpatik ini masih bersifat menyampaikan serta mengingatkan kepada semua juru parkir liar sehingga di suatu hari nanti ketika masyarakat yang belum mengetahui aturan itu maka di berikan semacam dispensasi hukum berupa nasehat karena berbeda dengan orang yang betul telah mengetahui aturan dengan orang yang memang belum mengetahui aturan.

Beberapa informan yang diwawancarai berbeda, pihak dari Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Bandar Lampung telah melakukan teguran simpatik akan tetapi hanya sebatas pada pengguna jalan yang memarkir di daerah tersebut sehingga dikemudian hari atau sekarang ini masih banyak parkir-parkir liar (Jukir Liar) di sepanjang jalan Balai kota salah satunya di Kantor Walikota Bandar Lampung karena mereka belum pernah mendapati sosialisasi tentang aturan Perda tersebut.

Pihak dari Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Bandar Lampung telah melakukan teguran simpatik akan tetapi hanya sebatas pada pengguna jalan yang memarkir di daerah tersebut sehingga dikemudian hari atau sekarang ini masih banyak parkir-parkir liar (Jukir Liar) di sepanjang jalan Balai kota salah satunya di Kantor Walikota Bandar Lampung karena mereka belum pernah mendapati sosialisasi tentang aturan tersebut.

Pengawasan represif adalah pengawasan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Bandar Lampung memberikan tindakan untuk menertibkan parkir liar. Patroli harian adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir terhadap pelanggaran yang dilakukan pengendara yang memarkir di jalan Sepanjang Kota. Patroli merupakan cara yang paling umum dilakukan untuk menertibkan parkir liar.

Tanggapan lain mengenai parkir liar adalah mengadakan pengawasan atau patroli rutin untuk menertibkan parkir liar apabila ada laporan yang didapati di lapangan. Masyarakat sangat merespon terhadap patroli harian yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Parkir karena mampu mengurangi kemacetan di jalan ini

Dapat dilihat betul adanya pengawasan yang kurang optimal dari Perusahaan Daerah (PD) Parkir terkait untuk menertibkan parkir liar dengan baik, walaupun terkadang mendapat rintangan dari para parkir liar yang tidak patuh. Selain masalah di atas ada beberapa hambatan dalam pengawasan parkir yang berakibat pada kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu: (1) kurangnya petugas di lapangan, (2) adanya beberapa kantor dan sekolah di jalan Balai kota, (3) pinggir jalan yang dijadikan tempat parkir darurat/dadakan

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pungutan Parkir Liar

Pungutan Parkir Liar secara pengertian berarti mengambil dan menarik tarif parkir secara liar yang berarti tidak resmi, tanpa izin resmi dari yang berwenang. Jadi pungutan liar berarti mengambil sesuatu dengan cara yang tidak resmi atau menarik sesuatu tanpa izin yang berwenang.

Dalam bahasa Arab pungutan liar disebut sebagai *al-maksu*, yang berarti memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi. *Maksu* (pungutan liar) adalah pajak yang ditagih oleh seseorang secara tidak legal, biasanya dari pedagang-pedagang kecil. Ibnu Mandzur menjelaskan lebih detail yaitu *al-Maksu* adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang dari pasar-pasar pada zaman jahiliyah.⁵³ Pungutan liar juga dapat berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pungutan liar didasarkan pada pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah ditentukan. Orang yang melakukan tindakan pungutan liar senantiasa mengabaikan kewajibannya, hal

⁵³ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, Jil. VI, (Bayrut: Dar Shadir, 1979), h. 220.

ini karena hanya mementingkan untuk mendapatkan keinginannya, yakni melakukan pungutan.

Menurut pandangan hukum Islam pungutan parkir liar merupakan perbuatan dosa, yang perbuatannya melanggar kaidah-kaidah hukum Islam. Walaupun dalam praktiknya pungutan atau tarif parkir liar di katakan lumrah dan bisa diterima oleh masyarakat luas dikarenakan sudah menjadi kebiasaan namun kegiatan tersebut seharusnya dapat ditindak tegas agar tidak banyak masyarakat yang terjerumus dan terus melakukan perbuatan dosa dan haram. Maka dibutuhkan juga peranan pemerintah sebagai penegak hukum. Karena Pemerintah yang memiliki wewenang dan hal ini sekaligus menjalankan perintah Allah SWT yang menganjurkan untuk melakukan Amar ma'ruf Nahi mungkar.

Sebagaimana dalil-dalil Hukum Islam yang mengharamkan Pungutan Liar

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
٢٩

3

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa [4]: 29)*

Dan dalam hadist nabi Muhammad SAW dari sahabat Ruwaifi bin Tsabit RA

إِنَّ صَاحِبَ الْمُكْسِ فِي النَّارِ

Artinya: *"Sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka."* (H.R. Ahmad dan Thabrani)

Dalam hukum positif suatu kegiatan dikatakan pungli apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta memberatkan

berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam yang mengedepankan hukum, karena pungli merupakan perbuatan yang menyimpang dan jelas merupakan sesuatu yang haram hukumnya. Dikatakan bukan pungli apabila telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah disepakati dan tidak memberatkan pihak mana pun maka kegiatan tersebut halal hukumnya dalam pandangan Islam.

³ Dalam ushul fiqh terdapat prinsip *al-mashlahah al-mursalah*, yakni kemaslahatan yang disyariatkan dalam wujud hukum. Dalam rangka menciptakan kemaslahatan yang berdasarkan prinsip, yang mengedepankan suatu baik dan buruk perbuatan dalam pandangan manusia maka pungutan liar yang bisa dikatakan tidak mengedepankan kemaslahatan umum dan menguntungkan suatu individu tertentu maka dalam hal ini pungutan liar parkir tidak dapat dibenarkan. Karena kemaslahatan merupakan hal utama dan pokok di dalam menentukan suatu norma-norma hukum baik negara maupun hukum Islam sendiri.

C. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Sehingga dalam perspektif Hukum Islam yang luas bahwa pemerintah harus ikut serta dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

³ Dalam hal yang berkaitan dengan upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengurangi praktik pungutan parkir liar yang ditinjau dari Pandangan Hukum Islam. Dari sinilah peneliti melihat bahwa dalam mengurangi praktik pungutan parkir liar pemerintah (Dishub) ini memiliki nuansa keagamaan seperti yang terdapat di dalam aspek kesejahteraan atau maslahat (kebaikan) ³ sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial, budaya dan sosial ekonomi. Upaya pemerintah daerah yang mencerminkan suatu nilai-nilai keagamaan dalam upaya mengurangi praktik parkir liar di antaranya:

1. Mengadakan Pembinaan dan Ajakan Untuk Menjadi Juru Parkir Yang Resmi Dan Mendapatkan SPT (Surat Perintah Tugas) dan Mereka Harus Mengikuti Aturan Yang Sesuai Dengan PERDA. Melalui pembinaan ini diharapkan dapat mendorong para petugas parkir liar dapat mendorong dan mampu menghasilkan tim parkir yang terlatih dan juga bisa memberikan pengaruh positif bagi masyarakat pengguna parkir karena mereka akan merasakan kualitas pelayanan dan kenyamanan di saat parkir kepada petugas yang memang resmi.
2. Mengadakan Sosialisasi Tentang Perpajakan Terhadap Masyarakat Agar Mereka Juga Bisa Membedakan Petugas Resmi dan Tidak Resmi. Secara umum sosialisasi dapat diartikan sebagai proses di mana manusia mempelajari peraturan maupun norma-norma yang berlaku pada masyarakat tempat tinggal sehingga nantinya dalam melakukan perannya sebagai anggota masyarakat tersebut.

3. Menindak tegas terhadap petugas Parkir Liar yang melakukan pungutan Parkir Liar di bahu jalan yang dibantu oleh aparat pemerintah lainnya untuk menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku. Secara umum tindakan ini merupakan sebuah sikap terhadap sesuatu hal yang tidak ragu lagi dan penuh pertimbangan (telah dipikirkan dengan matang) dengan resiko yang akan diperoleh. Bertindak tegas memiliki tujuan agar para petugas parkir liar bisa berkurang dan juga pemerintah harus bisa mengupayakan penegakkan hukum yang tegas untuk mengurangi premanisme. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat at-Tahrim [66]: 9:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ

Artinya: “Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.” (Q.S. at-Tahrim [66]: 9)

4. Meningkatkan Mekanisme Perparkiran Oleh Petugas Resmi Untuk Mengurangi Campur Tangan Petugas Parkir Liar. Melalui peningkatan ini pemerintah memberikan pelayanan agar mewujudkan pelayanan jasa yang tertib, teratur, aman dan nyaman, maka diperlukan peningkatan tersebut karena dalam Islam sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur di segala bentuk bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatu tidak diperbolehkan dilakukan secara asal-asalan. Kita semua berharap agar kualitas pelayanan jasa perhubungan berkualitas. Peningkatan kinerja aparatur dalam menertibkan perparkiran sehingga cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa perhubungan dapat tertangani dengan baik.

5. Melakukan pendataan ulang dan pembenahan peningkatan kinerja aparatur, yaitu dengan penertiban di lapangan dalam ³perparkiran agar petugas parkir resmi bekerja sesuai dengan PERDA Tentang Pengelolaan Parkir. Pendataan ulang dan pembenahan dilakukan dengan petugas parkir resmi yang memang bertanggung jawab di lapangan. Seperti dalam salah satu surat an-Nisa [4]: 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ﴾ ٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,*” (Q.S. an-Nisa [4]: 58)

Ayat di atas ³jelas bahwa memberikan amanat dan hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil. Keadilan disini adalah merupakan asas kepemimpinan. Sebagai pemerintah yang memberikan amanat dan tugas kepada koordinator lapangan mereka harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan. Maka dari itu, wajib bagi pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak dapat terpenuhi.

³Kelima upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam pandangan

Hukum Islam sudah baik dan mengacu pada aturan-aturan al-Qur'an dan Hadist. Selain itu tentu juga harus dipertimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), di mana menghindari keburukan jauh lebih baik daripada mencari dan mengambil kebaikan. Sehubungan dengan itu, mencari yang terbaik daripada yang baik juga harus diutamakan. Dalam kaitan ini bila dengan upaya pemerintah bisa membawa pada kemanfaatan dan kebaikan, pandangan agama adalah positif. Akan tetapi apabila upaya pemerintah untuk mengurangi praktik parkir liar membawa keburukan, maka pandangan agama negatif terhadap kegiatan

tersebut. Dalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan (mafsadat) lebih baik daripada mencuri dan mengambil kebaikan (maslahat). Oleh karena itu pandangan agama akan positif jika upaya yang dilakukan pemerintah dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Agama akan berpandangan menjadi negatif terhadap upaya pemerintah walaupun tujuannya baik tetapi dilakukan dengan cara tidak baik dan jauh dari pandangan syariat, maka hal tersebut ditolak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa Penulis tentang kegiatan pungutan parkir liar yang terjadi di seputaran kota Bandar Lampung maka penulis menyimpulkan ada beberapa hal, sebagai berikut.

1. Jasa parkir merupakan salah satu lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun pungutan tarif parkir liar yang terjadi di Kota Bandar Lampung masih banyak di kendalikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Pungutan parkir yang tidak resmi dapat dikatakan melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dan perbuatan yang haram dan dosa. Namun pungli dalam hukum Islam, apabila telah sesuai dengan ketentuan hukum negara dan agama maka dibolehkan. Karena tidak ada pihak manapun yang diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.
3. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran pemerintah dalam proses pengawasan preventif dalam penertiban parkir liar di sepanjang jalan Kota Bandar Lampung itu ⁴ belum maksimal, ini bisa dilihat dari indikator keluhan-keluhan masyarakat dan kurangnya pengawasan di mana sosialisasi serta teguran simpatik yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan kurang mengenai sasaran dan tidak terus-menerus.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa pemerintah melalui dinas perhubungan dan aparat-aparat penegak hukum sudah sesuai dengan unsur-unsur agama Islam akan tetapi terdapat kekurangannya karena pengawasan yang kurang mengena terhadap oknum-oknum pungutan parkir liar.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, diharapkan mampu untuk lebih tanggap dan dapat memberikan hukuman yang tegas kepada oknum-oknum yang melakukan pungutan liar parkir.
2. Kepada Masyarakat, diharapkan mampu untuk menolak hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimulai dari parkir sembarangan, maupun melakukan kegiatan parkir liar, maupun memberikan uang kepada oknum-oknum yang melakukan pungutan liar parkir.

Galang Turnitin

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.unila.ac.id

Internet Source

6%

2

repo.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

4%

3

www.scribd.com

Internet Source

3%

4

journal.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

6

eprints.umm.ac.id

Internet Source

1%

7

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

8

bloghukum-wimashi.blogspot.com

Internet Source

1%

9

pt.scribd.com

Internet Source

1%

10

dimensiilmu.blogspot.com

Internet Source

1%

11

es.scribd.com

Internet Source

1%

12

dishub-bandarlampung.com

Internet Source

1%

13

maalikghaisan.blogspot.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Galang Turnitin

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80
